

**PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG  
MENERIMA WARISAN  
(Studi Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam)**



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam  
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh:

**MUH. ABDULLAH**

**NIM. 104 001 050 19**

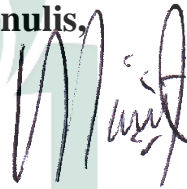
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

**Makassar, 12 April 2010**

**Penulis,**



**Muh. Abdullah**

**Nim : 10400105019**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi saudara Muh Abdullah. NIM. 104 001 050 19 mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul “PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 2010

Pembimbing I



**Drs. Supardin, M.HI.**  
**Nip. 19650302 199403 1 003**

Pembimbing II



**Alimuddin, S.Ag., M.Ag.**  
**Nip. 19720302 200501 1 003**

MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pembunuhan sebagai Penghalang Menerima Warisan, (Studi Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam)," yang disusun oleh **Muh. Abdullah**, NIM: 10400105019, mahasiswa Jurusan Perbandingan mazhab Dan Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 November 2010

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Drs. M. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA.	(.....)
Munaqisy II	: Abdi Widjaja, S.S., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. Supardin, M.HI.	(.....)
Pembimbing II	: Alimuddin, S.Ag., M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
NIP. 19581022 1987031 002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin.

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan Inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Demikian pula shalawat dan taslim penulis peruntukan kepada junjungan Nabiullah Muhammad S A.W. begitupun kepada segenap keluarganya dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebenaran yang dibawah oleh Rasulullah.

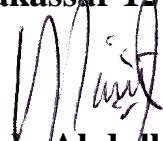
Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan studi maupun penulisan karya ilmiah ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik material lebih-lebih yang bersifat moral. Oleh karena itu, patutlah kiranya penulis menyampaikan kata syukur dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda yang tercinta, yang dengan sabar dan susah payah membesarkan dan membiayai penulis dari awal hingga sekarang, sehingga skripsi ini dapat terselasaikan.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para pembantu Rektor I, II, III atas segala bimbingan dan dorongannya kepada penulis.

3. Bapak Dekan dan pembantu Dekan I, II, III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah dengan sungguh-sungguh membina Fakultas ini.
4. Bapak Drs. Supardin, M.HI dan Alimuddin, S.Ag., M.Ag yang telah mengorbankan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis, sehingga terwujudlah skripsi ini.
5. Ibunda Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum dan Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum yang juga telah memberikan arahan-arahan mengenai judul skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen, Asisten Dosen dalam lingkungan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Akhirnya dengan selesainya skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat buat kita semua sebagai bahan renungan dan bacaan bagi pihak yang membutuhkan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Harapan dan do'a kiranya Allah SWT. Senantiasa memberikan kepada kita sekalian kesehatan yang baik, baik jasmani maupun rohani dan melapangkan jalan hidup kita sekalian untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan selama ini. Amien Yaa Rabbal Alamin.

**Makassar 12 April 2010**

  
**Muh. Abdullah**  
**Nim : 10400105019**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi .....	ii
Persetujuan Pembimbing .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Abstrak .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Hipotesis .....	3
D. Pengertian Judul .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metodologi .....	9
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II DASAR DAN SUMBER HUKUM KEWARISAN ....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Hukum Kewarisan Perdata dan Hukum Kewarisan Islam .....	11
B. Dasar-dasar Hukum Kewarisan Perdata dan Kewarisan Islam .....	16
C. Syarat-syarat Kewarisan Perdata dan Kewarisan Islam .....	33

<b>BAB III AHLI WARIS DAN PEMBAGIANNYA</b>	38
A. Menurut Hukum Perdata .....	38
1. Golongan I .....	38
2. Golongan II .....	42
3. Golongan III .....	43
4. Golongan IV .....	45
5. Kemungkinan Golongan III dan IV Mewaris Bersama .....	46
B. Menurut Hukum Islam .....	48
1. Ahli Waris .....	48
2. Golongan Ahli Waris .....	49
3. Pembagian Harta Warisan .....	55
<b>BAB IV ANALISIS TINDAKAN PEMBUNUHAN DALAM KEWARISAN</b>	66
A. Analisa Pembunuhan Menurut Hukum Perdata .....	68
1. Pengertian Pembunuhan .....	68
2. Macam-macam Pembunuhan .....	70
3. Pembunuhan yang tidak Mendapat Warisan .....	75
B. Analisis Pembunuhan Menurut Islam .....	77
1. Pengertian Pembunuhan .....	77
2. Macam-macam Pembunuhan .....	79
3. Pembunuhan yang tidak Mendapat Warisan .....	84
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	89
A. Kesimpulan .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	96



## **ABSTRAK**

**Nama : Muh. Abdullah**  
**N I M : 10400105019**  
**Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum**  
**Judul Skripsi : Pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan**  
**(Studi Perbandingan hukum perdata dan hukum Islam**

---

Skripsi ini membahas tentang “ pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan (Studi Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam)”. Penulis mengangkat dua permasalahan yang diambil dari judul, yaitu bagaimana pembunuhan dalam hukum perdata dan hukum Islam serta membahas pula bagaimana pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (Library Research) dimana diambil pendapat-pendapat para ahli hukum positif dan hukum Islam dalam buku-buku referensi yang ada sebagai rujukan penyusunan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Komparatif (Comparative Approach) untuk melihat sejauh mana pendapat-pendapat para ahli tentang pembunuhan dalam kewarisan.

Dari hasil penelitian, penulis menunjukkan bahwa suatu tindakan pembunuhan memberikan dampak terhadap hukum kewarisan baik dilihat dari tinjauan hukum perdata maupun dari tinjauan Fiqh.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa suatu tindakan pembunuhan dapat mengakibatkan putusanya hubungan mewarisi meskipun si ahli waris merupakan kerabat terdekat ataupun bahwa ahli waris merupakan pewaris tunggal dari pewarisnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan.

Banyak orang yang mengetahui, menurut undang-undang bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Selanjutnya, dalam hal bila mana baik keluarga sedarah maupun si yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal dunia menjadi milik Negara. Kemudian yang wajib melunasi segala utangnya dengan catatan harta peninggalan nya mencukupi untuk itu.

Demikian juga semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Apabila timbul perselisihan sekitar siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti diatas, maka hakim memerintahkan agar segala harta peninggalan yang meninggal dunia itu ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1987) h. v

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut pergantian kedudukan harta kekayaan yang menyangkut himpunan *aktiva*<sup>2</sup> dan *pasiva*<sup>3</sup> orang yang meninggal dunia. Ketertiban hukum yang berhenti sebagai pendukung hak dan kewajiban dinamakan ahli waris. Dalam makna hukum kekayaan para ahli waris pada hakekatnya, melanjutkan pribadi pewaris mengisi kekosongan yang terjadi karena kematian.<sup>4</sup>

Selain dari pada itu, hukum waris tidak hanya mengatur siapa saja yang dapat untuk memperoleh warisan. Akan tetapi, juga mengatur setiap hal yang mengakibatkan tidak dapat untuk menerima warisan ataupun akibat adanya halangan untuk mendapat hak waris. Adapun halangan-halangan itu adalah karena pengaruh orang atau kekerabatan, yakni adanya hubungan darah yang lebih dekat oleh pewaris dengan ahli warisnya sehingga ahli waris yang lain menjadi terhalang. Berikutnya adalah adanya halangan karena pengaruh suatu *washaf* (sifat) yang biasa juga dikenal dengan sebutan *mawani'ul irts*.

Pengaruh sifat yang dimaksud disini, adalah seorang ahli waris yang sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari Si-pewaris, namun karena padanya terdapat salah satu keadaan tertentu menyebabkan ia tidak dapat menerima warisan dari si-pewaris tidak dapat menerima warisan (adanya dianggap tidak ada). Maksudnya

---

<sup>2</sup> Aktiva adalah sejumlah benda yang nyata ada/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga, dan juga dapat berupa hak cipta dan sebagainya

<sup>3</sup> Pasiva adalah sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain dan sebagainya).

<sup>4</sup> M.JA. Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris* (Bandung: PT Eresco, 1993) h. 1

sekalipun ia memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris, tetapi karena adanya pengaruh sifat itu menyebabkan ia tidak memperoleh warisan.<sup>5</sup>

Adapun salah satu sifat yang dimaksud adalah karena pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada sipewaris. oleh karena hal tersebut mengakibatkan halangan bagi ahli waris atas harta warisan, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah, yang artinya; “*Pembunuh itu tidak mewaris*”.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka penulis jadikan masalah pokok adalah: Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan Hukum perdata dan Hukum Islam) dari pokok masalah tersebut maka penulis merumuskan dua sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembunuhan dalam hukum perdata dan hukum Islam?
2. Bagaimana pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan?

## **C. Hipotesis**

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka sebagai kerangka teori atau landasan berpijak dalam membahas skripsi ini, maka penulis membuat hipotesa sebagai berikut:

1. Pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa, pembunuhan itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu; pembunuhan sengaja yakni suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa ataupun melakukan sesuatu hal yang berbahaya pada korban hingga

---

<sup>5</sup> Drs.A.Assaad Yunus, *Pokok-pokok Hukum Kewarisan* (Jakarta,PT. Alqushwa, 1992)

membuatnya meninggal dikarenakan dengan niat untuk menghilangkan nyawanya, adapun jenis pembunuhan lainnya adalah pembunuhan kesalahan yakni, perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang yang tidak disertai dengan niat melainkan karena kelalaian/ketidak sengajaan,

2. Menurut ketentuan pasal 838 KUHPdt, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewarisi, salah satunya adalah karena melakukan tindakan kriminal kepada si-pewaris, yakni; *“mereka yang telah di hukum di persalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal”*.<sup>6</sup>

Adapun menurut pandangan ulama islam, mereka berbeda pandangan diantara mereka, yakni; Menurut Ulama *Syafi'iyah*, berpendapat bahwa: *“segala macam bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ahli waris kepada pewarisnya adalah menjadi penghalang baginya untuk menerima harta warisan”*, sedangkan menurut ulama *Hanafiyah*, berpendapat bahwa: *“Pembunuhan yang menjadikan seseorang ahli waris termasuk mawani'ul irtsi ialah pembunuhan yang mengakibatkan adanya sangsi qishash dan kaffarah”*. Adapun maksud Pembunuhan yang bersangsi *qishash* ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan sebelumnya, sedangkan pembunuhan yang bersangsi *kaffarah* yaitu:

---

<sup>6</sup> Prof. R. Subekti, S.H. dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA* (Cet 37; Jakarta, PT PRADNYA PARAMITA, 2006) h. 223.

- Pembunuhan mirip sengaja (*shibhul 'amdi*), yaitu sengaja melakukan penganiyayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia,
- Pembunuhan karena khilaf (*qathil-khata'i*), misalnya: seseorang menembak binatang buruan, yang dikenai sasaran peluru adalah manusia,
- Pembunuhan yang dianggap khilaf (*al-jari madjrol khathai*) misalnya seorang yang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjatuhkan seseorang hingga ia mati.<sup>7</sup>

#### **D. Pengertian Judul**

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan beberapa pengertian dari kata-kata yang dianggap penting sebagai berikut:

*Pembunuhan* merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang disengaja ataupun karena kekhilafan sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

*Penghalang* adalah suatu sebab atau alasan yang mengakibatkan sesuatu tidak dapat mencapai maupun memiliki yang di inginkan karena ketentuan suatu kaedah-kaedah.

*Warisan* ialah segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya<sup>8</sup> dan akan dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Drs. A. Assaad Yunus, *Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, (Jakarta, PT Alqushwa, Nov 2006).

*Perbandingan* merupakan sistem atau cara mencari perbedaan ataupun persamaan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan menganalisis guna mendapatkan jawaban yang lebih spesifik.

Hukum perdata menurut Subekti; “*Dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan*”<sup>9</sup>.

Adapun kalau kita menyebut hukum Islam, maka perlu dijernihkan dulu apa yang dimaksud dengan hukum Islam ini. Dalam agama Islam ada dua istilah yang biasanya diterjemahkan menjadi hukum Islam, yaitu *Syariah* (*Syara'*) dan *Fiqh*. Pengertian ini sering di kacaukan pemakaiannya, kadang-kadang sebagai hal yang sinonim dan kadang-kadang sebagai hal yang berbeda.

Adapun yang membedakan *syariat* dengan *fiqh*, yakni: *Syariat* adalah hukum-hukum yang telah jelas nash-NYA atau *qathi*, sedangkan *Fiqh* adalah hukum-hukum yang *zhanni* yang dapat dimasuki pemikiran manusia (*ijtihadi*)<sup>10</sup>. Namun dalam hal Skripsi ini, pengertian hukum Islam kita menggunakan pengertian *Fiqh*.

Adapun dalam pembahasan hukum Islam pada skripsi ini juga membahas permasalahan dalam *Kompilasi Hukum Islam*, dimana yang dimaksud *kompilasi* dalam pengertian *kompilasi hukum Islam* ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama

---

<sup>8</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, *S.H. Hukum Perdata Indonesia*, (Cet. 3; Bandar Lampung, PT Citra Aditya Bakti, Feb 2000) h. 192.

<sup>9</sup> F.X. Suhardana S.H (Cet. 2; Jakarta PT Gramedia Pusaka Utama, 1996) h. 6.

<sup>10</sup> DR. Bustanul Arifin, S.H, *PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, *Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta; Gema Insani Press, 1996) h. 40.



fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam suatu himpunan<sup>11</sup>

Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari pengertian judul skripsi ini adalah terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan dikarenakan perbuatan menghilangkan nyawa dari si-pewaris dengan cara melakukan perbandingan antara hukum Perdata dengan hukum Islam.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Skripsi ini membahas tentang “pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan (studi perbandingan hak-hak keperdataan dan hukum Islam)”. Karena itu dilihat dari sisi literatur yang digunakan menunjukkan bahwa secara khusus menggunakan dua sumber yang berbeda, yakni literatur yang bersumber dari hukum positif (Indonesia) dan literatur yang bersumber dari hukum Islam.

Adapun literatur yang membahas dari sisi hukum Islam tentang warisan pembunuh dapat di peroleh dari ayat-ayat al-Qur'an dan al-hadits serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti yang disusun oleh Drs. A. Assad Yunus “*Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraid)*” dimana dalam buku ini membahas tentang hukum-hukum dalam kewarisan serta menjelaskan segala hal yang berkaitan dengannya. Sama halnya dengan yang di atas, buku yang disusun oleh Effendi Perangin, S.H, dalam bukunya “*Hukum Waris*” juga membahas

---

<sup>11</sup> H. ABDURRAHMAN, SH. MH., *KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA* (Cet; 2, Jakarta; AKADEMIKA PRESSINDO, 1995) h. 14.



masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarisan serta hukum-hukumnya hanya saja dalam buku ini dilengkapi dengan contoh-contoh sederhana pembagian warisan.

Oemar Salim "*Dasar-dasar Hukum Waris*" membahas tentang dasar-dasar dalam kewarisan dan juga seputar permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi didalam kewarisan yang dilengkapi dengan solusi-solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Dalam bukunya "*Fiqhi Mawaris*" yang menjelaskan kandungan ilmu kewarisan serta memaparkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang dikandungnya serta pembagiannya masing-masing kepada ahli waris.

Prof. Drs. H. A. Djazuli dengan judul bukunya "*Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*" dimana di dalamnya memuat tentang hukum-hukum pidana Islam serta ganjaran terhadap pelanggaran hukum yang dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah serta pendapat-pendapat para ulama.

Adapun literatur yang berkaitan dengan hukum positif/perdata seperti yang disusun oleh Prof. R. Subekti, S.H bersama R. Tjitrosudibio dengan bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" yang di dalamnya menguraikan isi dari pasal-pasal Undang-Undang keperdataan yang dilengkapi dengan tambahan Undang-Undang pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan.

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H dalam bukunya "*Hukum Perdata Indonesia*" dimana dalam buku tersebut membahas pengertian

hukum perdata, sejarahnya, dan sumber dasar dari hukum perdata. Didalam buku ini juga menguraikan segala permasalahan pada hukum badan pribadi, hukum keluarga, hukum benda dan sebagainya.

Dari beberapa literatur diatas, belum ada yang membahas tentang judul yang menyangkut “pembunuhan sebagai penghalang kewarisan” secara khusus ataupun mendalam, melainkan hanya menjelaskan beberapa hal dasar dari judul. Maka dari itu, penulis akan mencoba membahas lebih dalam lagi terhadap judul skripsi ini pada pembahasan selanjutnya.

#### **F. Metodologi**

Penelitian skripsi ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana metode penelitian ini mencakup dua hal yaitu:

##### **1. Metode Pengumpulan Data.**

Data yang dikumpul diperoleh dari berbagai literatur yang ada dan relevan dengan pembahasan serta berhubungan dengan masalah pokok yang ingin dibahas dalam skripsi ini.

##### **2. Metode Pengolahan Data**

Data-data yang telah diperoleh akan diolah berdasarkan metode *induktif*, *deduktif* dan *komparatif*. Metode induktif yang dimaksud disini yaitu menarik kesimpulan khusus dari informasi yang bersifat umum. Metode deduktif yaitu upaya generalisasi terhadap informasi yang bersifat umum. Sedangkan metode komparatif yaitu membandingkan data-data yang ada antara satu sama lain untuk ditarik suatu solusi apabila terdapat perbedaan.

## **G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kriteria pembunuhan yang tidak layak untuk mendapatkan warisan.
2. Untuk mengetahui kemungkinan kepada pembunuh mendapatkan warisan.

Sedangkan kegunaan penulisan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khasanah intelektual tentang hukum kewarisan terkhusus dalam kasus warisan pembunuh.
2. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum-hukum positif dan hukum Islam, dalam hal ini khususnya pada kasus kewarisan.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif penyelesaian studi pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Alauddin Makassar.

## **BAB II**

### **DASAR DAN SUMBER HUKUM KEWARISAN**

#### **A. Pengertian Hukum Kewarisan Perdata dan Hukum Kewarisan Islam**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, mempergunakan istilah “hukum kewarisan” dan Soepomo menyebutnya dengan istilah “ hukum waris”.<sup>12</sup>

Dengan beberapa istilah ketiga ahli hukum tersebut di atas, baik mengenai penulisan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian

---

<sup>12</sup> Dr. Eman Suparman, S.H.,M.H, Hukum Waris Indonesia, *Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet 2; Bandung, PT Refika Aditama, 2007) h. 1

hukum waris itu sendiri, penulis lebih cenderung mengikuti istilah “hukum kewarisan” di dalam penulisan skripsi ini.

## **1. Pengertian Hukum Kewarisan Perdata**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah berasal dari *Burgerlijk Wetboek* yang terdiri dari 4 buku, dimana hukum kewarisan diatur dalam hukum kebendaan yakni pada jilid II KUH Perdata, yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata.

Didalam KUH Perdata tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya konsep-konsep tentang kewarisan, orang yang berdasarkan ketentuan berhak dan tidak berhak menerima warisan dan sebagainya. Namun pada pasal 830 KUH Perdata yang berbunyi; “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”<sup>13</sup>. Dapat dipahami sebuah pengertian bahwa “jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh harta hak dan kewajibannya akan beralih / berpindah kepada para ahli warisnya”.

Berdasarkan pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, beberapa ahli telah merumuskan hukum kewarisan, yakni;

Vollmar berpendapat bahwa “hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya”. Pendapat ini hanya di fokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Pendapat lainnya di kemukakan oleh Pitlo. Ia

---

<sup>13</sup> Prof subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, h.221.

berpendapat bahwa “hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”. Pendapat Pitlo ini agak luas, karena didalam pemindahan kekayaan itu, tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, namun juga di atur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Hubungan dengan pihak ketiga ini berkaitan dengan masalah-masalah utang piutang pewaris pada saat masih hidup.<sup>14</sup>

Pada hakekatnya hukum waris dapat timbul di karenakan adanya peristiwa kematian, dimana peristiwa kematian ini menimpa pada salah satu anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak, dengan demikian apa bila terjadi peristiwa kematian terhadap salah satu anggota keluarga tersebut, maka yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematiannya, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan, dengan kata lain; adakah harta kekayaan yang ditinggalkan?, siapa sajakah ahli warisnya?, serta siapa sajakah yang berhak menanggulangi hartanya terhadap pihak ketiga (masalah utang piutang si mati).

Jika dirumuskan, maka “hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk”. Dari

---

<sup>14</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis, BW*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002) h. 137-138

rumusan ini dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian hukum waris itu sebagai berikut:

- a). Subjek hukum waris yaitu pewaris, ahli waris, dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat;
- b). Peristiwa hukum waris yaitu meninggalnya pewaris;
- c). Hubungan hukum waris yaitu hak dan kewajiban ahli waris;
- d). Objek hukum waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum.

## **2. Pengertian Hukum Kewarisan Islam**

Di dalam Islam, ilmu kewarisan biasa pula disebut dengan ilmu *Faraid*, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam kitab-kitab *Fiqh* yang membahas tentang hukum waris, dimana dalam hal ini yang dimaksud dengan ilmu *faraid* adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum kewarisan seperti masalah ketentuan dalam pewarisan, hal-hal yang menyebabkan mendapat warisan ataupun tidak mendapat warisan dan cara pembagiannya masing-masing dan menjadi sebuah keputusan oleh ummat Islam untuk mengikutinya sebagai sarana menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan bersaudara dalam umat Islam.

Perkataan mewaris dalam bahasa Arab berasal dari kata “*warisa*”, “*yarisu*”, “*irsan*”, “*wamiirasan*”.<sup>15</sup>

Firman Allah dalam Qs. An-naml: 16 dan Qs. Al-qashash: 58 dikatakan:

---

<sup>15</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-shabuni, *Hukum Waris* (Cet; 1, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994) h. 30

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ...

**Terjemahnya;**

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. ... (QS. An Naml (27); 16),<sup>16</sup>

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

**Terjemahnya;**

“ ... . Dan kami adalah pewarisyah. (QS. Al Qashash (28) ; 58).<sup>17</sup>

Menurut *lughot*, arti kata “mewaris” adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu golongan kepada golongan yang lain, pengertian ini mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya menyangkut harta benda saja, melainkan juga ilmu atau kemuliaan. Termasuk dalam pengertian ini adalah sabda rasulullah saw:

“ulama’ adalah pewaris para Nabi”.

Hadits ini mengisyaratkan bahwa Nabi mewariskan sesuatu kepada para Ulama. Padahal Nabi tidak pernah mewariskan harta ataupun uang, tetapi hanya mewariskan ilmu. Dengan demikian, siapapun yang mempelajari ilmu (Agama), maka ia akan mewarisi ilmu dari Nabi.<sup>18</sup>

Pengertian mewaris menurut istilah ialah: pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 2002) h.595

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 619

<sup>18</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-shabuni, *op. cit.*, h. 31.



hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum *syara'*.<sup>19</sup>

Dalam redaksi lain yang dijelaskan oleh Teungku Muhammad Hasbi Asy-Shiddieqy bahwa, “kewarisan adalah beberapa kaidah yang terpetik dari *fiqih* dan *hisab* untuk mengetahui secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati dan bagian ahli waris dari harta peninggalan tersebut”<sup>20</sup>

Adapun pengertian secara khusus tentang kewarisan, tertuang BAB I Pasal 171a Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta pe-ninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa ba-giannya masing-masing”.<sup>21</sup>

## **B. Dasar-dasar Hukum Kewarisan Perdata dan Kewarisan Islam**

Dalam pembahasan sebelumnya, telah di jelaskan bahwa, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Maka berdasarkan hal tersebut mestilah ada yang mengatur ataupun sesuatu yang dapat dijadikan hukum untuk melangsungkan kewarisan, baik itu dalam lingkup hukum kewarisan perdata maupun dalam hukum kewarisan Islam.

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* (Cet; III, Bandung: CV Diponegoro, 1995).,h.41.

<sup>20</sup> Drs. Dian Khairul Umam, *FIQIH MAWARIS* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999) h. 14.

<sup>21</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2005) h. 56.

## 1. Dasar Hukum Kewarisan Perdata

Pada hakekatnya, hukum kewarisan Perdata hanya mengenal satu sumber sebagai dasar hukum kewarisan, yakni pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dimana didalamnya, kewarisan diidentikkan dengan kebendaan dan merupakan hukum yang mengatur segala hal menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, hal ini tertuang dalam pasal 584 KUH Perdata dan oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke- 2 KUH Perdata.

### **Pasal 584:**

Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena kewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.<sup>22</sup>

Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan yang tertuang dalam pasal 830 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Dua cara yang dimaksud itu adalah;

- ahli waris menurut ketentuan Undang-undang, dan
- karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Sebagai sumber hukum kewarisan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan segala hal yang menyangkut ketentuan-ketentuan

---

<sup>22</sup> Prof. R. Subekti, S. H. dan R. Tjitrosudibio, *op cit*, h 174

hukum kewarisan perdata. Diantaranya, tentang bagaimanakah pewarisan itu dan siapa sajakah yang patut mendapatkan warisan dan aturannya.

### **Pasal 832**

Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana wajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.<sup>23</sup>

Berkenaan dengan pasal yang disebutkan di atas, KUH Perdata juga mengatur kebolehan seseorang untuk menuntut hak supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan yang meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris, seperti yang tertuang dalam pasal 833 dan pasal 834 KUH Perdata. Namun untuk melakukan tuntutan hak hendaklah dilakukan sebelum gugur karena kedaluarsa, dengan tenggang waktu tiga puluh tahun setelah harta warisan dibagikan (pasal 835).<sup>24</sup>

Oleh karena disebutkan ada yang patut untuk menerima warisan, maka ketentuannya ada juga yang tidak patut mendapatkan warisan, meskipun berdasarkan faktanya memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang dekat dengan pewaris, namun karena melakukan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 221

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 222

sesuatu yang terlarang oleh KUH Perdata terhadap pewaris, menjadikannya tidak patut mendapat warisan.

### **Pasal 838**

Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.<sup>25</sup>

Bila mana harta warisan telah dibagikan sedangkan si penerima termaksud salah satu dari ketentuan diatas dinyatakan tidak patut menerima warisan, maka wajib baginya mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya (Pasal 839). Akan tetapi apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 223

pewarisan; namun orang tua itulah sama sekali tak berhak menuntut supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan (Pasal 840).<sup>26</sup>

Selain dari pada itu, KUH Perdata juga mengatur masalah pergantian tempat, yakni; berpindahnya hak untuk menerima warisan kepada keturunannya dikarenakan meninggal sebelum sempat mendapat harta warisan dari pewarisnya yang terlebih dahulu telah meninggal, masalah ini diatur dalam pasal 841 KUH Perdata sampai pasal 851 KUH Perdata.

#### **Perihal tesamen atau wasiat**

disamping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris, dapat juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat testamen adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia”. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali.<sup>27</sup>

#### **Pasal 875**

Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Dr. Eman Suparman, S. H., M. H., *op cit*, h. 29

<sup>28</sup> Prof. R. Subekti, S. H. dan R. Tjitrosudibio, *op cit*, h. 232

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*). Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak termaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intestato*.<sup>29</sup>

### **Pasal 919**

Bagian dari harta kekayaan seorang, yang mana ia diperbolehkan menggunakannya secara bebas, bolehlah ia memberikan atau menghibahkannya kepada orang lain, baik seluruhnya, maupun untuk sebagian, baik dengan perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat, baik kepada bukan ahli waris, maupun kepada anak-anaknya atau kepada mereka yang berhak menerima warisan, namun kesemuanya itu dengan tak mengurangi kewajiban sekalian penerima pemberian atau hibah tadi, untuk memasukkan kembali dalam warisan, segala apa yang telah diberikan atau dihibahkan kepada mereka, .....<sup>30</sup>

Mengenai pembuatan suatu surat wasiat hendaklah ditulis sendiri serta ditandatangani oleh si pemberi warisan dihadapan seorang notaris dan dua orang saksi yang kemudian disimpan notaris yang telah ditunjuk tadi serta diberikan wewenang untuk membacakannya pada waktu yang telah ditentukan dihadapan para ahli warisnya, ketentuan ini dibahas pada

---

<sup>29</sup> Dr. Eman Suparman, S. H., M. H. *loc. cit.*

<sup>30</sup> Prof. R. Subekti, S. H. dan R. Tjitrosudibio, *op cit*, h. 240-241

pasal 930-953 KUH Perdata beserta beberapa ketentuan yang berkenaan dengannya.

## **2. Dasar Hukum Kewarisan Islam**

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Alquran dan Hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang ditaqirirkan Rasulullah. Baik dalam Alquran maupun Hadis-hadis Rasulullah, dasar hukum kawarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Surah An-Nisaa'; disamping surah lainnya sebagai pembantu<sup>31</sup>

Berbeda dengan hukum perdata yang menjadikan KUHP sebagai sumber hukum kewarisan tunggal sebagai dasar hukumnya, maka hukum kewarisan Islam mempunyai dasar dari beberapa sumber, yakni; Alquran dan Hadis Rasulullah yang merupakan sumber pokok serta Al-Ijma' dan Al-Ijtihad sebagai sumber pendukung. Adapun rinciannya sebagai berikut:

### **a. Al-Quran**

Alquran merupakan sumber utama sebagai ajaran agama Islam tak terkecuali mengenai masalah kewarisan, yang mana didalamnya membahas berbagai macam dari ketentuan kewarisan dalam Islam, seperti ayat-ayat yang langsung menjelaskan pembagian warisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan jumlahnya serta ayat-ayat yang

---

<sup>31</sup> H. M. Idris Ramulyo, S. H., M. H., Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 35.

sifatnya pelengkap, yakni ayat-ayat yang berfungsi sebagai penjelas atau pembantu dalam pembahasan mengenai petunjuk Alquran berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.<sup>32</sup>

**Q. S. al – Nisaa' (4) : 7**

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

**Terjemahnya;**

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”<sup>33</sup>.*

**Q. S. al – Nisaa' (4) : 11**

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
الْأُشْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ  
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْأُشْدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ

<sup>32</sup> Dr. Abdul Ghofur Anshori, S. H., M. H., Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, anggota IKAPI, 2005) h. 25-26.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *op cit*, h. 116



وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

### Terjemahnya;

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa’atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>34</sup>

### Q. S. al – Nisaa' (4) : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ ذِينَ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ

مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

<sup>34</sup> Ibid

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ق</sup> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ <sup>ج</sup> فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ <sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ

### Terjemahannya;

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, h. 117

**Q. S. al – Nisaa' (4) : 33**

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكَ

فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَتُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

**Terjemahnya;**

*“ Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu ”<sup>36</sup>*

**Q. S. al – Nisaa' (4) : 176**

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْثُلَ هَٰلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا

تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ

تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

**Terjemahnya;**

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,*

<sup>36</sup> Ibid, h. 122-123

*Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>37</sup>*

Dari beberapa ayat diatas dijelaskan bahwa tiap-tiap manusia memiliki hak dari harta kedua orang tua dan kerabatnya begitu pula sebaliknya, sehingga apabila terjadi kematian maka haruslah ada pengurusan hartanya berupa hukum kewarisan. Selain itu dijelaskan pula ketentuan-ketentuan jumlah harta pusaka yang dapat diterima dari pewaris kepada ahli warisnya dalam kondisi dan situasi tertentu.

Telah dijelaskan bahwa; selain mengenai dasar pokok kewrisan, ada juga ayat-ayat yang sifatnya pembantu atau penjelas terhadap ayat-ayat pokok kewarisan, ayat-ayat itu diantaranya menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban serta larangan-larangannya dalam hukum kewrisan. Ayat-ayat yang dimaksud diantaranya adalah;

1). Kewajiban pewaris untuk memperhatikan kesejahteraan ahli waris:

**Q. S. al – Nisaa' (4) : 9**

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

---

<sup>37</sup> Ibid, h. 153

### Terjemahnya;

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”<sup>38</sup>.*

### Q. S. al – Baqarah (2) : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

### Terjemahnnya; M A K A S S A R

*“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin*

---

<sup>38</sup> Ibid, h. 116

anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan<sup>39</sup>”.

2). Dasar mewarisi karena pertalian darah:

**Q. S. al – Anfal (8) : 75**

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا۟ الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

**Terjemahnya;**

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”<sup>40</sup>.

**Q. S. al – Ahzab (33) : 6**

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنۢ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُۥ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا۟ إِلَىٰ  
أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا

<sup>39</sup> *ibid*, h. 57

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 274

### Terjemahnya;

*“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”<sup>41</sup>.*

#### b. Al-Hadits

Al Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran dimana dalam ketentuannya tidak boleh bertentangan atau harus sejalan dengan Alquran. Hadits adalah segala ketetapan hukum yang diberikan oleh Rasulullah, yakni berupa perkataan, perbuatan dan taqirir Nabi.

Berikut ini beberapa hadis yang ada kaitannya dengan hukum kewarisan. Sesuai dengan yang dikutip oleh H. M. Idris Ramulyo, S.H., M.H., dari Sajuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kewrisan di Indonesia*.

1. Hadis Nabi dari Ibnu ‘Abbas riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi: *“Berikanlah fara'idh (bagian yang telah ditentukan dalam Alquran) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”*.
2. Hadis Rasulullah saw.yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasaa'I, bersabda Rasulullah saw.: *“Belajarlah Alquran dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah fara'idh dan ajarkanlah dia karena sesungguhnya kamu adalah seorang yang akan*

---

<sup>41</sup> Ibid, h. 667



*mati dan ilmu akan terangkat, bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih, tetapi mereka tak akan ketemu kepada seorang yang akan menggambarkan kepada mereka (hukumnya)''.*

3. Hadis Rasulullah saw. diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni, berbunyi sebagai berikut. *“Belajarlah fara'idh dan ajarkanlah kepada manusia, karena ia itu separuh ilmu, dan ia itu akan dilupakan. Fara'idh adalah ilmu pertama yang akan tercabut dari umatku”.*

4. Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah berbunyi sebagai berikut.

*“Ilmu itu tiga, selain dari itu semuanya cabang, yaitu Ayat yang tegas; Sunnah yang sahih; Pembagian warisan yang adil”.*

5. Hadis Rasulullah saw. yang dari jabir menurut riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidszi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang Maksudnya: isteri Sa'ad Ibn Rabi' datang kepada Rasulullah saw. bersama dua orang anak perempuannya lalu ia berkata: *“Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad Ibn Rabi' yang telah gugur dalam peperangan bersama Anda di Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Sedangkan keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta”.* Nabi bersabda: *Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu”.* Sesudah itu turunlah ayat tentang kewarisan, kemudian Rasulullah memanggil paman mereka dan Rasulullah bersabda: *“Berikanlah dua*



*pertiga untuk dua orang anak sa'ad, seperdelapan untuk jandanya, dan sisanya adalah untukmu”.*

6. Hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

*“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak menjadi ahli waris bagi orang Islam”.*

7. Hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

*“Tidak dapat warisan seorang anak kecil, kecuali apabila ia lahir dengan bersuara (menangis atau hidup)”.*

8. Hadis Rasulullah saw, yang berasal dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah saw, telah bersabda:

*“Seorang yang telah membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya”.*<sup>42</sup>

c. *Al-Ijma’ dan Al-Ijtihad*

*Al-Ijma’* adalah kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-quran dan Al-sunnah, sebagian ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan *Ijma’* yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara’ mengenai suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> H. M. Idris Ramulyo, S. H., M. H., *op. cit.*, h. 56-58.

<sup>43</sup> Dr. Ahmad Rofiq, MA., *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) h. 27

*Al-Ijtihad* adalah pemikiran Sahabat atau Ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud di sini adalah ijtihad dalam penerapan hukum (*tathbiq al-ahkam*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.<sup>44</sup>

Adapun salah satu contohnya, yakni yang terjadi di zaman pemerintahan khalifah Umar bin Khathab r.a. yaitu ketika beliau didatangi oleh salah seorang sahabat yang menanyakan penyelesaian suatu masalah seseorang yang meninggalkan ahli waris suami yang *fard*-nya  $\frac{1}{2}$ , dan 2 orang saudara sekandung yang *fard*-nya  $\frac{2}{3}$ . Semula beliau bimbang dan tidak mengetahui siapakah yang berhak didahulukan menurut ketentuan Allah SWT. Dan sekiranya beliau mengetahuinya tentu beliau akan mendahulukannya dan siapakah yang harus diakhirkan oleh Allah SWT. Yang kalau mengetahuinya, niscaya beliau akan mengakhirkannya. Masalah tersebut kemudian dimusyawarahkan dengan Zaid bin Sabit r.a. dan Abbas bin Abdul Muthalib r.a. kemudian atas usul Abbas bin Abdul Muthalib, Umar bin Khathab r.a. memutuskan *aul*<sup>45</sup> atas masalah yang semula diragukan.<sup>46</sup>

### **C. Syarat-Syarat Kewarisan Perdata Dan Kewarisan Islam**

Pada hakikatnya ketentuan dari syarat kewarisan Perdata dengan kewarisan Islam secara pokok tidak memiliki perbedaan yang berarti,

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Aul* adalah adanya kelebihan dalam saham ahli waris dari besarnya asal masalah dan adanya penyusutan dalam kadar penerimaan mereka, dikarenakan asal masalahnya tidak cukup memenuhi fard-fard dari ashabul furud (Muhammad makhluf).

<sup>46</sup> Drs. Dian Khairul Umam., *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h. 135

melainkan saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hanya saja dalam sub pokoknya memiliki sedikit perbedaan, untuk lebih memperjelas dari ketentuan-ketentuan yang ada berikut adalah syarat kewarisan hukum perdata dan hukum Islam.

#### 1. Syarat Kewarisan Perdata

Berdasarkan KUH Perdata, untuk terjadinya kewarisan setidaknya memiliki tiga syarat, yakni;

##### a. Kematian

Berdasarkan ketentuan pasal 830 KUH Perdata menyebutkan, bahwa pewarisan hanya dapat berlangsung karena adanya kematian, namun dapat pula terjadi kewarisan berdasarkan keputusan hakim, hal yang kedua ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 470 KUH Perdata.

Harta peninggalan tidak dapat dibagikan sebelum sipewaris itu belum dinyatakan meninggal secara hakiki atau atas dasar keputusan hakim. Jika seseorang hilang sehingga tidak diketahui keadaannya, maka untuk menentukan statusnya apakah ia masih hidup ataukah sudah mati, dapat ditentukan berdasarkan keputusan hakim dengan bukti-bukti yang autentik. Setelah ada keputusan hakim tentang kematian seseorang, barulah harta peninggalannya dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

##### b. Para ahli waris harus masih hidup.

Para ahli waris harus benar-benar masih hidup ketika orang yang memberi warisan meninggal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 836 KUH Perdata: .... Supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus

telah ada, pada saat warisan jatuh meluang<sup>47</sup>. Dengan demikian, bila terjadi suatu peristiwa dimana terdiri dua orang yang secara hakekat dapat saling mewarisi mendapatkan musibah yang sama dan mengakibatkan mereka meninggal, maka berdasarkan saksi dan bukti, haruslah jelas siapa yang meninggal lebih dulu, supaya harta peninggalannya dapat juga dibagikan kepada yang meninggal kemudian, sebelum harta si yang terakhir ini dapat dibagikan kepada para ahli warisnya. Karena bila tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan pasal 831 dan pasal 894 KUH Perdata dianggaplah mereka mati bersama dan mengakibatkan tidak dapat saling mewarisi satu sama lainnya.

c. Tidak ada halangan bagi ahli waris untuk mendapat warisan.

Maksudnya bahwa, yang menjadi ahli waris jelas kedudukan golongannya dan tak ada golongan lain yang menghalanginya, atautkah ahli waris tidak menjadi salah satu dari ketentuan yang dianggap tidak layak mendapat warisan.

## 2. Syarat Kewarisan Islam

Sama halnya kewarisan perdata, syarat kewarisan Islam juga hanya dapat terjadi bila terpenuhinya tiga ketentuan, yakni;

a. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum,

Dengan adanya syarat yang pertama diatas, maka segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan kecuali orang tersebut benar-benar

---

<sup>47</sup> Prof. R. Subekti, S. H. dan R. Tjitrosudibio, *op cit.*, h. 222

telah meninggal dunia ataukah berdasarkan keputusan hakim telah dinyatakan telah meninggal.

Dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam, dikenal juga mati secara taqdiri sehingga dapat pula dijalankan kewarisan dikarenakan hal tersebut. Mati taqdiri adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.<sup>48</sup>

b. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris,

Ahli waris bisa mendapatkan harta peninggalan hanya melalui kewarisan serta jelasnya keadaan ahli waris, dengan kata lain ahli waris harus benar/jelas ada ketika pewaris meninggal.

Jika dua orang atau lebih yang saling mewarisi meninggal dunia dalam suatu kecelakaan dalam suatu kecelakaan dan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka mereka tidak boleh memiliki tirkah diantara satu sama lain, maka tirkah semuanya menjadi hak ahli waris masing-masing yang masih hidup.<sup>49</sup>

c. Mengetahui kedudukan atau status ahli waris.

Kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris harus diketahui secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami atau istri, anak kandung, saudara kandung, dan sebagainya, sehingga memudahkan

---

<sup>48</sup> Drs. Dian Khairul Umam, *op cit*, h.136

<sup>49</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam.*, *op cit.*, h. 49

dalam menentukan pembagian warisnya. Besarnya bagian waris akan berbeda jika hubungan dengan pewaris berbeda. Seseorang akan mendapat bagian pokok sedangkan yang lainnya akan mendapat bagian sisa; seseorang bisa terhalang oleh ahli waris lain sementara lainnya tidak.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Trigenda Karya, 1995) h. 48-49.

### **BAB III**

#### **AHLI WARIS DAN PEMBAGIANNYA**

##### **A. Menurut Hukum Perdata**

Di dalam KUH Perdata ada empat golongan yang secara bergiliran berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewarisnya. Artinya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak mendapat harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah golongan kedua sehingga golongan tiga dan empat tidak mendapat warisan, begitu juga pada golongan berikutnya, hanya saja, dalam aturan KUHP memungkinkan golongan tiga dan empat mewaris bersama yakni apabila keluarga sedarah pewaris pada golongan tiga telah dikloving dan ternyata satu garis sudah tidak ada, maka separuh harta warisan jatuh kepada keturunan satu garis yang sudah tidak ada tadi yakni sebagian dari golongan empat. Adapun golongan itu, adalah;

##### **1. Golongan I**

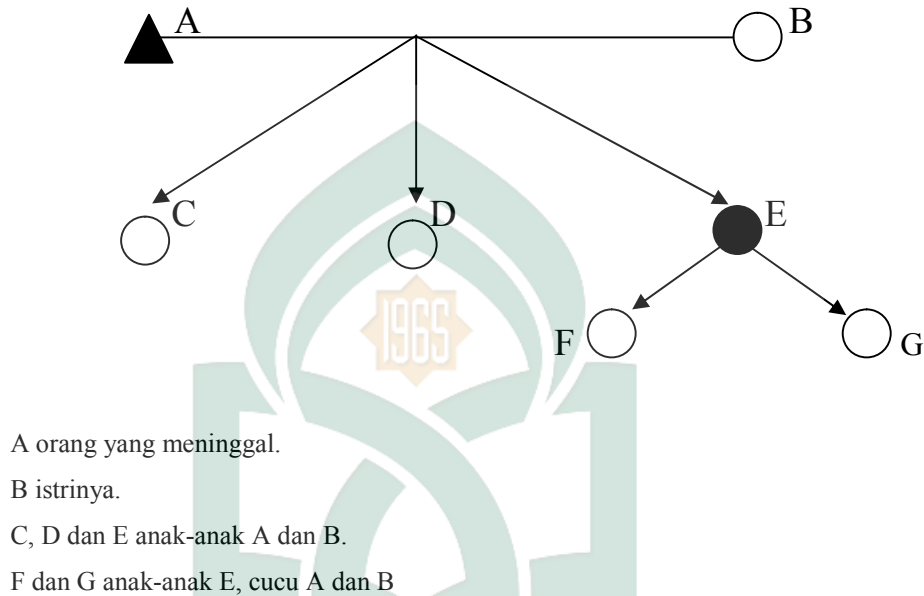
Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, anak-anak beserta keturunannya dalam garis kebawah baik sah maupun tidak sah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan, dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Mereka itu menyingkirkan anggota keluarga yang lain dalam garis keatas, dan dalam garis kesamping.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> H. M. Idris Ramulyo, S. H., M. H., *op. cit.*, h. 96

Berikut adalah ahli waris golongan pertama dan bagiannya masing-masing serta penjelasan yang berkenaan dengannya. Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya.

Bagan 1



A Orang yang meninggal, B Istrinya C, D dan E anak-anak A dan B dan F serta G adalah anak-anak E atau cucu A dan B

Semua: istri A, anak A dan cucu A adalah ahli waris golongan I. Juga termasuk golongan pertama semua keturunan C, D, E, F, dan G.

Pembagian warisan dalam hal diatas ialah:

B, C dan D masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan. Karena E meninggal lebih dahulu dari A, maka bagiannya dibagi sama oleh anaknya F dan G masing-masing mendapat  $\frac{1}{8}$ .

Menurut pasal 852:

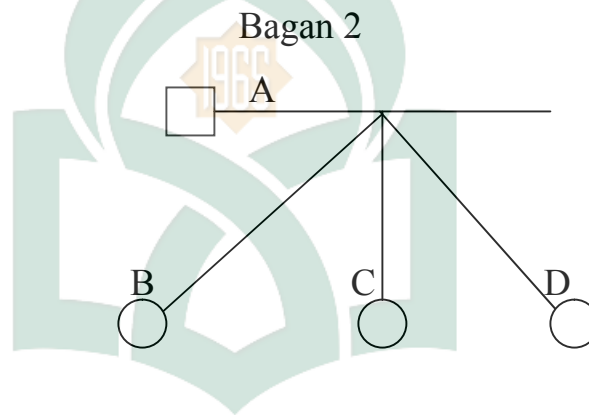
“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau



semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu”.<sup>52</sup>

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

Ayat 2 pasal 852 menyatakan: “Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri”.



A meninggal.

B, C dan D adalah anak-anak A, bertalian keluarga derajat kesatu dengan A.

B, C dan D mewaris kepala demi Kepala (sama kedudukan dan bagian masing-masing).

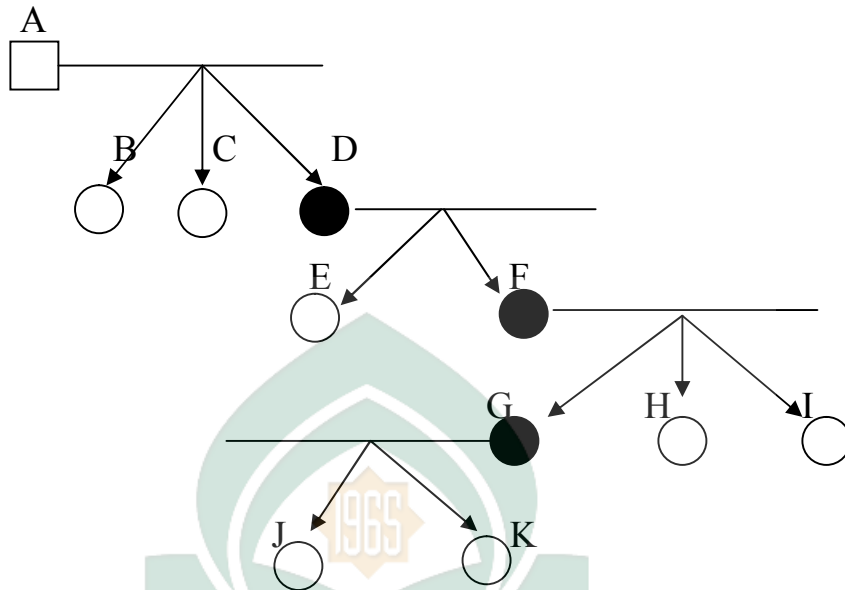
Lanjutan dari ayat 2 pasal 852: “... mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Prof. R. Subekti, S. H. dan R. Tjitrosudibio, *op cit.*, h. 225-226

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 226.

Bagan 3



Dalam pancang B, C dan D harta warisan dibagi lebih dahulu. Bagian D dibagi oleh E dan F. Bagian F dibagi lagi oleh G, H dan I. Bagian G dibagi pula oleh J dan K.

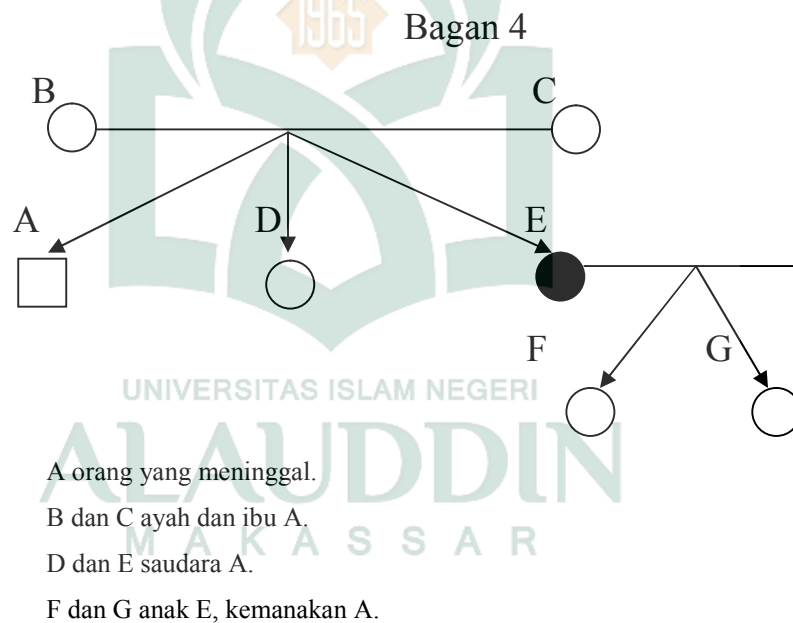
Pasal 852 a(1) menetapkan, bahwa bagian suami/istri yang hidup terlama maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Effendi Parangin, SH, Hukum Waris, (Cet. 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001) h. 27-29.

## 2. Golongan II

Golongan kedua ini terdiri dari orang tua (bapak dan ibu) dan saudara-saudara (kakak dan adik) dari orang yang meninggal dunia. Pada dasarnya orangtua dipersamakan dengan saudara.<sup>55</sup>

Pembagian warisan golongan kedua ini diatur dalam pasal 854, 855 dan 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), menurut pasal-pasal diatas dijelaskan bahwa; apabila seseorang meninggal dunia, maka harta warisannya jatuh kepada orangtua (bapak dan/atau ibu) dan/atau saudara-saudara (kakak dan adik) serta anak keturunannya



Semua: ayah dan ibu A, saudara-saudara A dan keturunannya adalah ahli waris golongan kedua. Pembagian warisan dalam hal ini ialah:

---

<sup>55</sup> H. M. Idris Ramulyo, S. H., M. H., *op. cit.*, h. 96

B, C dan D mendapat masing-masing  $\frac{1}{4}$ . E meninggal lebih dahulu, sehingga kedudukannya digantikan kedua anaknya yang masing-masing mendapat setengah dari yang seharusnya didapatkan E, yaitu masing-masingnya sebagian  $\frac{1}{8}$ .

### 3. Golongan III

Dari pasal 854 dan pasal 859 KUH Perdata (BW) dapat disimpulkan, apabila pewaris tidak meninggalkan anak-anak, cucu-cucu, keturunan seterusnya, saudara-saudara, janda atau duda, orang tua (ayah dan ibu) dan hanya meninggalkan kakek dan nenek dari pancar ayah dan ibu. Maka harta warisan terlebih dahulu harus dibagi dua sebelum diibagikan.

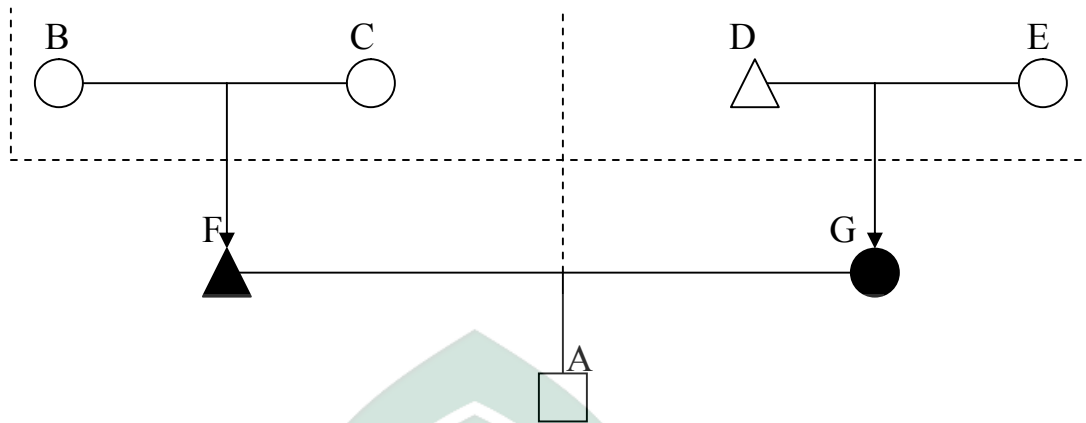
Ciri khas perhitungan bagian masing-masing ahli waris golongan III adalah diawali dengan pembagian harta atas dua bagian yang sama (dikloving). Dasar hukum ketentuan untuk golongan III adalah pasal 850 KUH Perdata. Berikut bunyi selengkapnya: “Dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 854, 855 dan 859, tiap-tiap warisan yang mana, baik seluruhnya maupun untuk sebahagian para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau dalam garis menyimpang harus dibelah menjadi dua bagian yang sama, bagian-bagian mana yang satu adalah untuk sekalian sanaksaudara dalam garis bapak dan yang lain untuk sanak saudara dalam garis ibu.”<sup>56</sup>

Berdasarkan pasal 850 KUH Perdata diatas dapat dijelaskan dengan bagan berikut ini;

---

<sup>56</sup> Anisitus Amanat, S. H., CN, *MEMBAGI WARISAN, Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW* (Cet 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2003) h. 124

Bagan 5



A orang yang meninggal.

B dan C adalah orangtua F, kakek dan nenek A.

D dan E adalah orangtua G, kakek dan nenek A<sup>57</sup>

Semua: B dan C adalah kakek dan nenek A dari pihak ayah (F) dan D dan E adalah kakek dan nenek A dari pihak ibu (G). Pembagian warisan dalam hal ini ialah:

Berdasarkan pasal 850 dan pasal 853 (1) KUHP, harta warisan mula-mula dibagi dua;

- $\frac{1}{2}$  untuk pihak ayah (B dan C).
- $\frac{1}{2}$  untuk pihak ibu (D dan E).

Jadi, pembagian warisan dalam hal tadi ialah: B dan C mendapat  $\frac{1}{4}$  setelah membagi bagian secara rata  $\frac{1}{2}$  tadi, begitu pula dengan D dan E, masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$ .

---

<sup>57</sup> *Ibid*,

#### 4. Golongan IV

Ahli waris golongan keempat adalah saudara/i dari kedua orangtua serta sekalian keturunannya mereka sampai derajat keenam dengan kemungkinan derajat ketujuh karena pergantian tempat. Golongan ahli waris ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Sistem pewarisan untuk ahli waris golongan IV ini merupakan kelanjutan dari sistem yang ada pada golongan III, yaitu adanya sistem klovning atau pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama.<sup>58</sup>

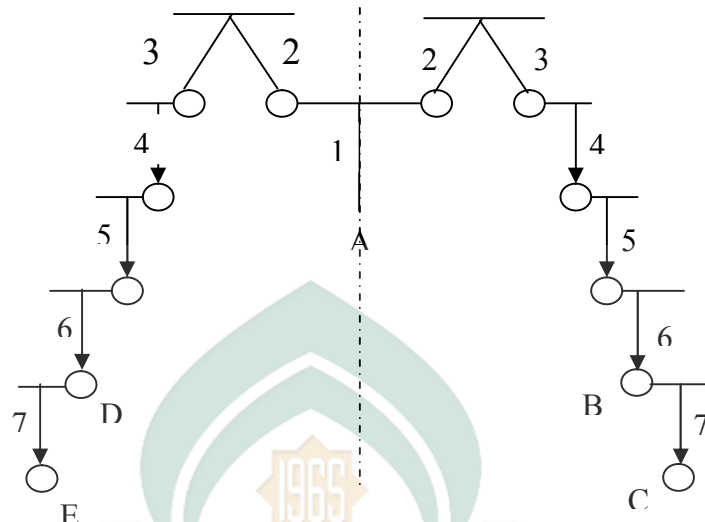
Pasal 858 menentukan: Jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis keatas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekeluarga sedarah dalam garis masih hidup, setengah bagian lainnya, kecuali dalam pasal 859 menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.

Dari pasal 858 dapat dijelaskan dengan bagan berikut, dimana menunjukkan bahwa; keluarga kesamping ada dua kelompok. Pertama, keluarga garis kesamping dari pihak ayah. Kedua, keluarga garis kesamping dari pihak ibu.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 125

Bagan 6<sup>59</sup>



Sebelah kiri adalah keluarga kesamping dari pihak bapak (kelompok D dan E). sebelah kanan adalah keluarga garis kesamping dari pihak ibu (kelompok B dan C).

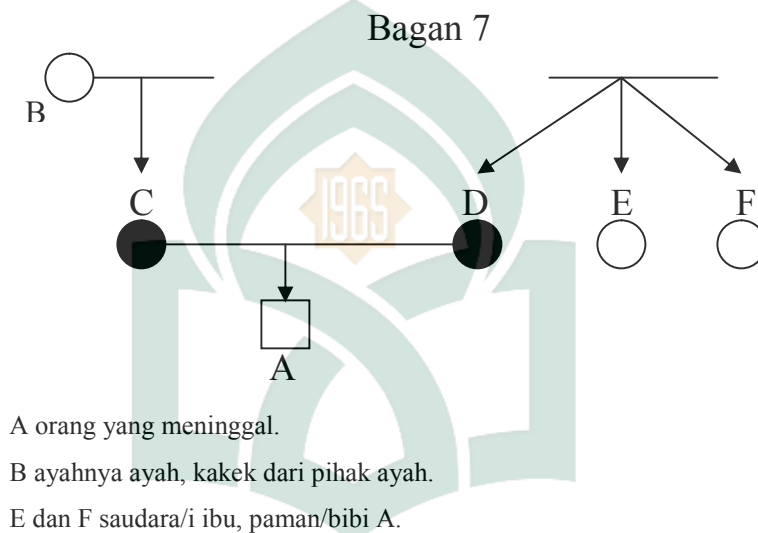
Penderajatannya adalah. B dan D merupakan keluarga garis kesamping derajat keenam. B dan D merupakan batas yang boleh mewaris, sedangkan C dan E masuk derajat ketujuh, jadi tidak termasuk ahli waris, namun salah satu atau keduanya dari mereka (C dan E) dapat menjadi pewaris pengganti bila sampai derajat keenam telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris.

##### 5. Kemungkinan Golongan III Dan IV Mewaris Bersama.

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung tentang ciri khas perhitungan bagian masing-masing ahli waris golongan III, yaitu diawali

<sup>59</sup> Ibid. h. 126

dengan pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama. Juga telah dibicarakan sistem kloving ahli waris golongan IV. Oleh karena harta warisan pewaris pada ahli waris golongan III sudah dikloving, maka ada kemungkinan keluarga sedarah garis bapak hanya kakek atau nenek saja (golongan III), sedangkan keluarga sedarah garis ibu tidak ada kakek atau nenek dan yang ada hanya saudara/i ibu (golongan IV).<sup>60</sup>



Semua: B adalah kakek A dari garis ayah merupakan ahli waris golongan III sedangkan E dan F adalah saudara/i ibunya A adalah ahli waris golongan IV.

Pembagian warisan dalam hal diatas ialah:

- $\frac{1}{2}$  untuk pihak ayah (B).
- $\frac{1}{2}$  untuk pihak ibu (E dan F).

Jadi, pembagian warisan setelah dikloving adalah: B mendapat  $\frac{1}{2}$  sebagai pihak dari garis ayah, sedangkan E dan F yang merupakan pihak

<sup>60</sup>*Ibid*, h. 127



dari garis ibu mendapat masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian setelah setengahnya harta warisan itu dibagi dua.

Apabila keluarga sedarah pewaris dalam salah satu garis tidak ada, maka seluruh warisan pewaris menurut pasal 861 ayat 2 KUH Perdata jatuh kepada keluarga sedarah dalam garis yang masih ada itu. Pasal 861 ayat 2 berbunyi: “Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewaris, maka segala keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.”<sup>61</sup>

## **B. Menurut Hukum Islam**

Sebelum berbicara mengenai pembagian masing-masing ahli waris, hendaknya kita merinci terlebih dahulu beberapa hal yang berkaitan dengannya, yakni mengenai siapakah yang dapat disebut ahli waris serta pembagian kelompok diantara mereka yaitu sebagai berikut:

### **1. Ahli waris**

Didalam Islam diketahui bahwa ahli waris terdiri dari dua macam, yakni ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan) dan ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak, atau menurut sebagian mazhab Hanafiyah, karena sebab perjanjian (janji setia).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 128.

<sup>62</sup> Drs. Ahmad Rofiq. M. A., *HUKUM ISLAM DI INDONESIA* (Cet 6: Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003) h. 383.

## 2. Golongan ahli waris

Berdasarkan bagian atau berhak tidaknya seseorang menerima warisan, maka ahli waris dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

### a. Ahli waris *zul furud*

*Zul furud* atau *zawil furud*, biasa juga disebut *ashabul furud*, artinya ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan yang ditentukan *Al-quran*, dan *hadis* Nabi SAW.

Dalam pembagian harta waris, para ahli waris dari *ashabul furud* harus didahulukan daripada golongan *asabah* dan *zawil arham* kalau ada. Hal ini harta peninggalan itu akan habis dibagikan kepada *ashabul furud* sesuai dengan bagiannya masing-masing. Bila ada sisanya, sisa harta inilah yang kemudian dibagikan kepada ahli waris dari golongan *asabah*, sesuai dengan ketentuan dalam pembagian pusaka kepada mereka.<sup>63</sup>

### b. Ahli waris *asabah*

*Asabah* menurut bahasa berarti semua kerabat seorang laki-laki yang berasal dari ayah. Mereka disebut *asabah* karena mereka merupakan orang-orang yang menghalangi atau melindungi.<sup>64</sup>

Menurut Hasanain Muhammad Makhluף, *asabah* adalah orang-orang yang tidak mempunyai saham-saham (bagian-bagian) tertentu, tetapi mengambil bagian yang tersisa setelah diambil bagian yang tersisa setelah diambil bagian *ashabul furud*, atau mengambil seluruh harta peninggalan apabila tidak ada seorang pun ahli waris *ashabul furud*.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Drs. Dian Khairul Umam, *op cit*, h. 61

<sup>64</sup> Ibid. h.75

<sup>65</sup> Prof. Dari. H. Suparman Usman, S. H. dan Drs. Yusuf Somawinata, *FIQH MAWARIS* (Cet. 2: Jakarta: GAYA MEDIA PRATAMA, 2002) h. 73

Berdasarkan hal diatas, dapat dipahami bahwa ahli waris *asabah*, adakalanya mendapatkan bagian, namun pula terkadang tidak mendapat bagian bila harta warisan habis dibagikan kepada ahli waris *ashabul furud* ataukah bahkan mendapat semua harta warisan bila yang bertindak sebagai ahli waris *ashabul furud* tidak ada sama sekali.

Menurut Sayid Sabiq; *Asabah* terdiri atas dua bagian yakni *asabah nasabiyah* dan *asabah sababiyah*. *Asabah Nasabiyah* berdasarkan adanya ikatan kekerabatan, sedangkan *asabah sababiyah* berdasarkan adanya memerdekakan hamba sahaya/budak.<sup>66</sup>

Mengenai *Asabah Nasabiyah*, Rifa'i Arief membaginya menjadi tiga bagian, yaitu: *Asabah bil nafsi*, *Asabah bil ghair* dan *Asabah ma'al ghair*<sup>67</sup> Adapun penjelasan dari ketiga golongan ini ialah:

(1). *Asabah bil nafsi*

Yang dimaksud dengan *asabah binafsi* adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan orang yang meninggal tanpa diselingi oleh orang perempuan.<sup>68</sup>

Ketentuan ini mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, bahwa diantara mereka tidak ada perantara sama sekali dengan orang yang meninggal, seperti anak laki-laki dan ayah orang yang meninggal; serta yang kedua, bahwa terdapatnya perantara pewaris dengan ahli waris tetapi bukan perempuan, seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayahnya ayah, saudara sekandung dan saudara seayah.

---

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 74

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Drs. Dian Khairul Umam, *op cit*, h. 79

Jika orang yang menjadi perantara itu perempuan, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, ayahnya ibu, dan saudara seibu, mereka bukan *asabah bil nafsi*. Kedua orang pertama sebagai *zawil arham*, dan seorang yang terakhir sebagai *ashabul furud*.

Berikut adalah orang-orang yang berhak menjadi penerima '*asabah bil nafsi*', terdiri dari 12 orang, yaitu:

1. Anak laki-laki,
2. Cucu laki-laki pancar laki-laki,
3. Bapak,
4. Kakek,
5. Saudara laki-laki sekandung,
6. Saudara laki-laki sebapak,
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak,
9. Paman sekandung,
10. Paman sebapak,
11. Anak laki-laki paman sekandung dan
12. Anak laki-laki paman seayah.

(2). *Asabah bil ghair*

*Asabah bil ghair* adalah seseorang atau sekelompok anak perempuan bersama seorang atau sekelompok anak laki-laki, dan seorang atau sekelompok saudara perempuan dengan seorang atau sekelompok saudara laki-laki, manakala kelompok laki-laki tersebut

ahli waris *asabah bil nafsi*<sup>69</sup>, bila itu terjadi maka dengan sendirinya menjadi *asabah bil ghair*.

Mereka terdiri atas empat orang wanita *fard*. Mereka mendapat  $\frac{1}{2}$  bila tunggal dan  $\frac{2}{3}$  bila lebih dari seorang. Keempat orang wanita tersebut adalah:

1. Anak perempuan kandung menjadi *asabah* bersama anak laki-laki kandung,
2. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) menjadi *asabah* anak laki-lakinya anak laki-laki,
3. Saudara perempuan sekandung menjadi *asabah* bersama saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara perempuan seayah menjadi *asabah* bersama saudara laki-laki seayah.

Apabila salah seorang dari keempat perempuan tersebut bersama salah seorang *muasib binafsi* yang derajat dan kekuatannya sama, ia menjadi *asabah bil ghair* (bersama orang lain). Ia bersama-sama dengan *muasib*-nya menerima sisa harta peninggalan dari *ashabul furud* atau menerima seluruh harta peninggalan bila tidak ada *ashabul furud*, dengan ketentuan orang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian orang perempuan.<sup>70</sup>

### (3). *Asabah ma'al ghair*

*Asabah ma'al ghair* adalah seorang atau sekelompok saudara perempuan, baik sekandung maupun seapak, yang mewaris

---

<sup>69</sup> Prof. Dari. H. Suparman Usman, S. H. dan Drs. Yusuf Somawinata, *op cit*, h. 77

<sup>70</sup> Drs. Dian Khairul Umam, *op cit*, h. 88

bersama-sama dengan seorang atau sekelompok anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki, manakala tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak serta tidak ada saudaranya yang laki-laki, yang menjadikannya sebagai ahli waris *ashabal bil ghair*.<sup>71</sup>

*Asabah ma'al ghair* hanya terdiri atas saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.

Kedua orang tersebut dapat menjadi *asabah ma'al ghair*, dengan beberapa syarat berikut:

1. Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah,
2. Tidak berdampingan dengan saudaranya yang menjadi *muasib*-nya.

*Muasib ma'al ghair* itu hanya diperlukan semata-mata untuk menjadikan *asabah* beberapa saudara perempuan yang di-*asabah*-kan memperoleh sisa harta peninggalan setelah digunakan untuk memenuhi bagian *ashabul furud*, termasuk bagian *muasib*-nya.

c. Ahli waris *zul arham*

Kata *Al-arham* adalah bentuk jamak dari kata *Rahman*, yang menurut bahasa artinya ialah tempat terbentuknya janin dalam perut ibunya. Pengertian tersebut kemudian diperluas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang akibat

---

<sup>71</sup> Prof. Dari. H. Suparman Usman, S. H. dan Drs. Yusuf Somawinata, *op cit*, h. 78-79

adanya hubungan darah<sup>72</sup>. Keluasan arti *zul arham* tersebut diambil pengertian lafazh *ulul arham* yang terdapat dalam *Al-qur'an* :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya;

“...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari ada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah... .” (QS. Al-Anfal (8) :75)<sup>73</sup>

Secara umum pengertian *zul arham* mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik yang termasuk ahli waris golongan *ashabul furud*, *asabah*, baik laki-laki maupun perempuan, baik seorang maupun banyak.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *zul arham* menurut istilah adalah mereka (semua ahli waris) yang tidak memiliki bagian tertentu dalam *Al-quran* dan *As-sunnah*, serta bukan termasuk *asabah*. Jadi, setiap kerabat yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dan tidak mewarisi melalui *furud* dan *ta'sib*, dia termasuk *zul arham*.<sup>74</sup>

Adapun yang termasuk *zawil arham* diantaranya, sebagai berikut:

1. Cucu perempuan pancar perempuan dan seterusnya kebawah,
2. Cucu laki-laki pancar perempuan dan seterusnya kebawah,

<sup>72</sup> Drs. Dian Khairul Umam, *op cit*, h. 97

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *op cit*, h.274

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 98.



3. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya kebawah,
4. Anak perempuan saudara laki-laki seapak dan seterusnya kebawah,
5. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya kebawah,
6. Anak perempuan saudara perempuan sekandung dan seterusnya kebawah,
7. Anak laki-laki saudara perempuan seapak dan seterusnya kebawah,
8. Kakek dari pihak ibu dan seterusnya keatas,
9. Dan sebagainya.<sup>75</sup>

### **3. Pembagian harta warisan**

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia, hanya saja banyak diantaranya (Negara Islam) melakukan penyesuaian aturan hukum terhadap keperluan serta penyesuaian kondisi kemasyarakatan suatu Negara masing-masing, tak terkecuali di Indonesia.

Di Indonesia sendiri dikenal aturan hukum kewarisan Islam yang secara khusus diatur dalam “Kompilasi Hukum Islam”, dimana dalam penjabarannya tidak jauh berbeda dengan hukum kewarisan Islam murni, hal ini dikarenakan secara garis besarnya tetap berpedoman pada garis besar yang tersirat dalam *Al-quran* dan *As-Sunnah*, hanya saja sedikit menyesuaikan dengan hukum kewarisan yang sudah ada terlebih dahulu di Indonesia; yakni hukum kewarisan perdata yang lebih dikenal dengan “Hukum BW”.

---

<sup>75</sup> Prof. Dr. H. Suparman Usman, S. H. dan Drs. Yusuf Somawinata, *op cit*, h. 80-81.

Sehingga berdasarkan hal diatas perlu dirumuskan pembagian harta waris menurut hukum Islam, yakni berdasarkan *fiqh* (*Al-quran* dan *As-Sunnah*) serta berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

a. Pembagian berdasarkan *fiqh*

Didalam *Al-quran* terdapat beberapa ayat yang langsung dan yang tidak langsung menyinggung mengenai kewarisan, seperti surah al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33, dan 176 serta pada surah al-Anfal ayat 75. Namun yang langsung berbicara tentang *furudh* atau *faraid* (rincian bagian dalam waris) hanya tiga ayat, yakni pada surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

(1) Surah al-Nisa' ayat 11 membahas mengenai;

- Hak anak laki-laki dan anak perempuan dengan uraian:
  - a) anak perempuan tunggal mendapat  $\frac{1}{2}$ ,
  - b) anak perempuan lebih dari seorang mendapat  $\frac{2}{3}$ ,
  - c) anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang perempuan.
- Hak ibu dan ayah dengan uraian;
  - a) ibu dan ayah masing-masing menerima  $\frac{1}{6}$  bila pewaris meninggalkan anak,
  - b) ibu menerima  $\frac{1}{3}$  bila pewaris tidak meninggalkan anak,
  - c) ibu menerima  $\frac{1}{6}$  bila pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki beberapa orang saudara.

- Ayah dan ibu bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.

(2) Surah al-Nisaa' ayat 12 membahas mengenai:

- Hak kewarisan suami atau isteri dengan uraian:
  - a) Suami yang kematian isteri menerima hak  $\frac{1}{2}$  bila isterinya tidak meninggalkan anak, dan  $\frac{1}{4}$  kalau isterinya meninggalkan anak,
  - b) Isteri yang kematian suami menerima  $\frac{1}{4}$  bila suaminya tidak meninggalkan anak, dan  $\frac{1}{8}$  jika suami meninggalkan anak.
- Hak saudara-saudara bila pewaris adalah kalalah dengan uraian:
  - a) bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang maka mendapat  $\frac{1}{6}$ ,
  - b) bila saudara lebih dari seorang, maka mereka bersama mendapat  $\frac{1}{3}$ .

(3). Surah al-Nisaa' ayat 176 membahas tentang dua hal:

- Kalalah didefinisikan sebagai seorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak,
- Bila pewaris adalah kalalah, saudara menerima hak dengan uraian:
  - a) seorang saudara perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$ ,
  - b) lebih dari seorang saudara perempuan, maka mereka bersekutu mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  harta peninggalan,
  - c) bila bergabung saudara laki-laki dan perempuan, mereka menerima semua bagian sisa dengan bandingan seorang laki-laki sama dengan dua bagian perempuan.

Dari penjelasan diatas mengenai *faraid* dalam *Al-Quran* yang begitu mudah dan sederhana. *Al-quran* hanya menjelaskan kewarisan secara *furudh* dan tidak menjelaskan kewarisan secara terbuka atau mereka yang berhak mewarisi seluruh harta jika seorang diri dan mewarisi sisa bila ada bersama *ashabul furud* yang lain. Maka inilah yang disebut dengan kewarisan *asabah* dan system pembagiannya adalah sebagai berikut;

1. Anak perempuan:

$\frac{1}{2}$  : sendiri

$\frac{2}{3}$  : berbilang

Abg : ada anak laki-laki

2. Cucu perempuan dari garis laki-laki

$\frac{1}{2}$  : sendiri

$\frac{2}{3}$  : berbilang

$\frac{1}{6}$  : ada satu anak perempuan

Abg : ada cucu laki-laki

M : ada dua anak perempuan atau ada anak laki-laki

3. Ibu

$\frac{1}{3}$  : tidak ada: anak, cucu, dua saudara atau lebih

$\frac{1}{6}$  : ada anak, cucu, dua saudara atau lebih

4. Bapak

$\frac{1}{6}$  : ada anak laki-laki

$\frac{1}{6}+a$ : bersama anak perempuan/cucu perempuan garis laki-laki

Abn : tidak ada anak laki-laki/ cucu laki-laki

5. Nenek

$1/6$  : seorang atau berbilang

Dr pihak ibu M : ada ibu

Dr pihak bapak M : ada ibu dan bapak

6. Kakek

$1/6$  : ada anak lk2/ cucu lk2

$1/6+a$  : ada anak prp/ cucu prp

Abn : tidak ada anak lk2 atau cucu lk2

M : jika ada ayah

7. Sdr perempuan sekandung

$1/2$  : seorang

$2/3$  : berbilang

Amg : bersama anak prp atau cucu prp

Abg : bersama saudara lk2 kandung

M : ada anak lk2, cucu lk2 atau ayah

8. Sdr perempuan seayah

$1/2$  : sendiri

$2/3$  : berbilang

$1/6$  : bersama satu orang saudara kandung

Abg : bersama saudara lk2 seayah

Amg : bersama anak prp atau cucu prp

M : ada anak lk2, cucu lk2, ayah, sdr lk2 kandung, saudara kandung prp ketika bersama anak prp/ cucu prp, 2 sdr prp jika saudara prp seayah tidak bersama dengan saudara lk2 seayah.

9. Saudara seibu (laki-laki/prp)

$\frac{1}{6}$  :sendiri

$\frac{1}{3}$  : berbilang

M : ada anak/ cucu, ayah, dan kakek

10. Suami

$\frac{1}{2}$  : tidak ada anak atau cucu

$\frac{1}{4}$  : ada anak atau cucu

11. Isteri

$\frac{1}{4}$  : tidak ada anak atau cucu

$\frac{1}{8}$  : ada anak atau cucu<sup>76</sup>

b. Pembagian berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pada dasarnya “Kompilasi hukum Islam” itu adalah hukum berdasarkan *fiqh* itu sendiri, oleh karenanya isi dari pada KHI tidak jauh berbeda dengan hukum kewarisan Islam berdasarkan *fiqh* hanya saja mengalami beberapa penyesuaian terhadap kondisi ke-Indonesia-an.

Berdasarkan hal diatas, dalam persoalan mengenai besarnya bagian warisan dalam KHI, ada beberapa hal penting diperhatikan dimana dapat berupa persamaan dan perbedaan dengan hukum kewarisan berdasarkan *fiqh*:

1. Mengenai porsi perbandingan bagian wanita dan bagian laki-laki masih dipertahankan secara ketat bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, walaupun sebenarnya cukup banyak orang termasuk dari kalangan umat Islam sendiri yang

---

<sup>76</sup> Kumpulan Arsip St Asma Amin S.Hi.

menginginkan penentuan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi karena dalil Al-quran tentang hal ini cukup tegas, maka Kompilasi Hukum Islam menuangkannya sebagaimana tersebut diatas. Pasal 176 KHI menyebutkan “.... Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

2. Mengenai prinsip musyawarah dalam pembagian berdasarkan KHI juga dimungkinkan, hal ini tertuang dalam Pasal 183 yang menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
3. Penentuan bagian dari masing-masing ahli waris adalah sesuai dengan ketentuan *faraid* yang umumnya ditentukan kasus per kasus seperti dapat dilihat dalam pasal 177-182 KHI.
4. Dalam Kompilasi Hukum Islam diterangkan secara jelas adanya ahli waris pengganti, yakni adanya hak bagi anak terhadap warisan yang seharusnya diterima oleh bapaknya dari pewarisnya, hanya saja meninggal sebelum sempat mendapat hak warisannya. Hal ini dituangkan dalam pasal 185 ayat (1) KHI: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 KHI.

Adapun untuk pembagiannya secara terinci, berikut adalah berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam menurut urutan pasal per pasalnya:



1. Anak perempuan mendapat bagian

- $\frac{1}{2}$  bila hanya seorang,
- $\frac{2}{3}$  bila dua orang atau lebih,
- Sisa bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan dia menerima separuh bagian anak laki-laki.

Pasal 176 KHI menyebutkan:

*“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.*

2. Ayah, menerima bagian:

- Sisa bila tidak ada *far'u* waris (anak atau cucu),
- $\frac{1}{6}$  bila bersama anak laki-laki dan/atau anak perempuan,
- $\frac{1}{6}$  tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja,
- $\frac{2}{3}$  sisa dalam masalah *garrawain* (ahli warisnya terdiri dari: suami/isteri, ibu dan ayah)

Pasal 177 Kompilasi menyatakan bagian ayah yang tidak lazim dalam fiqh, karena biasanya ayah bagiannya adalah sisa apabila tidak ada anak.

3. Ibu, menerima bagian

- $\frac{1}{6}$  bila ada anak (satu atau lebih),
- $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak atau saudara dua lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja,

- $\frac{1}{3}$  sisa dalam masalah *garrawain*.

Dinyatakan dalam pasal 178 KHI:

- 1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- 2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

4. Saudara perempuan seibu, menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$  satu orang tidak bersama anak dan ayah,
- $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah

Pasal 181 KHI berbunyi:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

5. Saudara perempuan sekandung, menerima:

- $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak ada anak dan ayah,
- $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah,
- Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki (*asabah bil ghair*),
- Sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (*asabah ma'al ghair*).

6. Saudara perempuan seayah, menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak ada anak dan ayah,

- $\frac{2}{3}$  dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah,
- Sisa, bersama saudara laki-laki seayah,
- $\frac{1}{6}$  bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$ ,
- Sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (*asabah ma'al ghair*).

Dalam Kompilasi ditegaskan dalam pasal 182:”*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.*

7. Kakek dari garis ayah (prinsipnya dianalogikan kepada ayah, kecuali dalam keadaan bersama-sama saudara-saudara sekandung atau seayah)” menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$  bila bersama anak atau cucu,
- Sisa, tidak ada anak atau cucu,
- $\frac{1}{6}$  tambah sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan,
- $\frac{1}{3}$  / *muqasamah* dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, memilih yang menguntungkan,

- $\frac{1}{6}$  /  $\frac{1}{3}$ x sisa/*muqasama* sisa bersama saudara-saudara sekandung atau seayah dan ahli waris lain, dengan ketentuan memilih yang menguntungkan.

8. Nenek, menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$  baik seorang atau lebih.

9. Cucu perempuan garis laki-laki:

- $\frac{1}{2}$  satu orang tidak ada *mu'assib* (penyebab menerima sisa),
- $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih,
- $\frac{1}{6}$  bersama satu anak perempuan (penyempurna  $\frac{2}{3}$ ),
- Sisa (*asbah bil gair*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

10. Suami, menerima:

- $\frac{1}{2}$  bila tidak ada anak atau cucu,
- $\frac{1}{4}$  bila ada anak atau cucu.

Pasal 179 KHI: “Duda mendapat separuh bagian bila pewarisan tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”

11. Istri menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$  bila tidak ada anak atau cucu,
- $\frac{1}{8}$  bila ada anak atau cucu.

*Pasal 180 KHI: “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.<sup>77</sup>*

---

<sup>77</sup> Drs. Ahmad Rofiq. M. A., *op cit.* h. 409-413.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINDAKAN PEMBUNUHAN**

#### **DALAM KEWARISAN**

Sebelum membahas mengenai masalah jenis-jenis pembunuhan serta yang pembunuhan yang tidak mendapat warisan, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai siapa-siapa saja yang tidak mendapat warisan.

Pada hakikatnya, terdapat persamaan antara KUH Perdata dengan hukum fiqh mengenai yang tidak berhak mendapatkan warisan, hanya saja fiqh Islam lebih kepada masalah keagamaan.

Dalam KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris, ialah: mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si meninggal; mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat; mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Dari hal diatas jelaslah bahwa, terdapat beberapa orang yang berdasarkan ketentuan berhak mendapatkan warisan hanya saja karena adanya tindakan ataupun perbuatan kepada si pewaris yang berupa

kejahatan dengan ganjaran pidana, mengakibatkannya tidak berhak mendapatkan warisan.

Sama halnya dengan Hukum Islam, dimana juga terdapat beberapa hal yang berdasarkan ketentuan tidak berhak mendapat warisan dari Si-pewaris, hanya saja terdapat perbedaan mengenai jumlah ketentuan perbuatan atau sesuatu hal yang menyebabkan tidak mendapat warisan, ini dikarenakan terjadinya perbedaan berdasarkan situasi dan kondisi oleh sipemikir atau ahli ilmu kewarisan dengan pemikir-pemikir lainnya, ada yang menyebutkan tiga bagian, empat bagian, lima bagian dan ada pula dengan jumlah yang sama tetapi berbeda ketentuan.

Menurut Dr. Eman Suparman, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Kewarisan Indonesia menyebutkan: *“terdapat tiga kondisi yang mengakibatkan seseorang tidak berhak mendapat warisan yakni; ahli waris yang membunuh pewaris, orang yang murtad dan orang yang kafir tidak berhak mendapatkan warisan dari si pewaris.”*<sup>78</sup>

Didalam buku Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam yang disusun oleh Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H dan Drs. Yusuf Somawinata menyimpulkan, *“ada empat perkara yang menyebabkan tidak mendapat warisan, yakni; perbudakan, pembunuhan, berlainan agama dan berlainan Negara”*<sup>79</sup>, sedangkan yang disimpulkan oleh H.M. Idris Ramulyo, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *“ada lima hal yang mengakibatkan seseorang tidak*

---

<sup>78</sup> Dr. Eman Suparman, S. H., M. H., *op cit*, h. 23-24.

<sup>79</sup> Prof. Dr. H. Suparman Usman, S. H. dan Drs. Yusuf Somawinata, *op cit*, h. 32.

*mendapatkan warisan, yakni; karena perbudakan, karena pembunuhan, berlainan agama, murtad dan karena hilang tanpa berita*”<sup>80</sup>.

Secara garis besar, kita dapat menyimpulkan bahwa yang terhalang untuk mendapatkan warisan dalam konteks Islam kekinian adalah karena pembunuhan dan berlainan agama, sedangkan mengenai perbudakan tak lagi dijadikan alasan karena sudah tak ada lagi, sedangkan murtad dan kafir sudah termasuk kedalam berlainan agama, adapun yang mengenai berlainan Negara menurut penyusun tidak dapat dijadikan alasan karena pada hakekatnya selama memiliki hubungan kekerabatan terhadap si pewaris, berarti memiliki hak terhadap harta peninggalannya. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 menyebutkan bahwa, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

## **A. Analisis pembunuhan menurut hukum perdata**

### **1. Pengertian pembunuhan**

Setiap perbuatan pidana pasti ada pertanggung jawaban pidananya, begitu pula dengan pembunuhan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>80</sup> H. M. Idris Ramulyo, S. H., M. H., *op cit*, h. 88-89

Pidana (KUHP) terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang pembunuhan, yaitu yang tercantum dalam pasal-pasal: 338 (pembunuhan biasa) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 15 tahun penjara, 339 (pembunuhan dengan pemberatan/yang dikualifisir) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 5 tahun penjara, 340 (pembunuhan berencana) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara, 341 (pembunuhan bayi/anak biasa) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 7 tahun penjara, 342 (pembunuhan bayi berencana) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 9 tahun penjara, 343 (untuk mengancam orang lain/selain ibu yang terlibat pembunuhan bayi) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya sama dengan 338 atau 340, 344 (euthanasia) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 12 tahun penjara, 345 (mendorong orang lain bunuh diri) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 4 tahun penjara, 346-349 (aborsi) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya (antara 4 - 12 tahun) penjara, 351 ayat 3 (penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 7 tahun penjara, 353 ayat 3 (penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang)



dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 9 tahun penjara, 354 ayat 2 (penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 10 tahun penjara, 355 ayat 2 (penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan matinya orang) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 15 tahun penjara, 359 (karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 5 tahun penjara atau satu tahun kurungan .

Berdasarkan hal diatas dapat dipahami bahwa pembunuhan dapat terjadi terhadap dan oleh siapa saja baik secara langsung maupun melalui perantara (pengekskusi) dan dapat dikenai hukuman pidana yang berbeda-beda tergantung dari jenis pembunuhan yang dilakukan, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.

## **2. Macam-macam pembunuhan**

Berbicara mengenai permasalahan pembunuhan dalam Hukum Kewarisan, maka secara otomatis menyangkut masalah Hukum Pidana. Dimana pada hakikatnya pembunuhan berkenaan langsung serta menyangkut tentang Hukum Pidana dan lebih dikenal dengan kejahatan terhadap nyawa. Didalam KUH Pidana mengenai pembunuhan, pembunuhan terbagi atas dua bagian, yakni; kejahatan terhadap

nyawa/pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan terhadap nyawa/pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja<sup>81</sup>.

Berikut ini perincian mengenai kejahatan terhadap nyawa/pembunuhan dengan sementara mengesampingkan keterkaitannya dengan masalah kewarisan.

a. Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) yang dilakukan dengan sengaja.

Pada prinsipnya sebuah tindakan akan menimbulkan sebuah akibat, dimana dalam hal ini sebuah tindakan kejahatan terhadap nyawa tentunya akan berdampak kepada nyawa seseorang yang menjadi korban. Sehingga perlu untuk dibedakan jenis-jenis tindakan pembunuhan dengan sengaja karena memiliki dampak yang berbeda baik kepada korban maupun terhadap pelakunya. Jenis-jenis pembunuhan itu ialah;

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok<sup>82</sup>.

Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 KUHPidana yang rumusannya adalah: *“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”*<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001) h. 55

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 56.

<sup>83</sup> DR. Andi Hamzah, S.H., *KUHP dan KUHPA*, edisi revisi 2008 (Cet. 15: Jakarta: Rineka Cipta, 2007) h.135

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindakan pidana lain<sup>84</sup>.

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 KUH Pidana, yang berbunyi: *“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”*<sup>85</sup>.

3. Pembunuhan berencana<sup>86</sup>.

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 KUH Pidana yang rumusannya adalah: *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”*<sup>87</sup>.

---

<sup>84</sup> Adami Chazawi, *loc. cit.*

<sup>85</sup> DR. Andi Hamzah, S.H., *loc. cit.*

<sup>86</sup> Adami Chazawi, *loc. cit.*

<sup>87</sup> DR. Andi Hamzah, S.H., *loc. cit.*

4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan<sup>88</sup>.

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut pembunuhan bayi, bentuk pembunuhan ini diatur dalam dua pasal KUH Pidana, yakni:

Pasal 341:

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana penjara paling lama 7 tahun”<sup>89</sup>.

Pasal 342:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa dia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”<sup>90</sup>.

5. Pembunuhan atas permintaan korban<sup>91</sup>.

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam pasal 344 KUH Pidana, yang merumuskan sebagai berikut: “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas

---

<sup>88</sup> Adami Chazawi, *loc. cit.*

<sup>89</sup> DR. Andi Hamzah, S.H., *op cit.* h. 135

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> Adami Chazawi, *loc. cit.*

dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”<sup>92</sup>.

6. Pengancuran dan pertolongan pada bunuh diri<sup>93</sup>.

Kejahatan yang dimaksud adalah yang tercantum dalam pasal 345 KUH Pidana, yang rumusannya adalah:

“Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”<sup>94</sup>.

b. Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Telah dijelaskan diatas bahwa setiap tindakan kejahatan terhadap nyawa akan menimbulkan akibat bagi korban dan pelaku, tidak terkecuali kepada tindakan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Mengenai hal tersebut dijelaskan dalam rumusan pasal 359 KUH pidana yang berbunyi; *“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana paling lama 1 tahun”*<sup>95</sup>.

Pada hakekatnya suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja, tidak memiliki perbedaan yang berarti bila dibandingkan dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan

---

<sup>92</sup> Ibid

<sup>93</sup> Adami Chazawi, *loc. cit.*

<sup>94</sup> DR. Andi Hamzah, S.H., *loc. cit.*

<sup>95</sup> Ibid. h. 135

sengaja, keduanya merupakan tindakan yang melanggar dimata hukum dan harus diganjar dengan hukuman pidana. Hanya saja pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja dilengkapi dengan unsur kelalaian dimana bila dibandingkan dengan unsur dari tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tidak memilikinya dan hanya memiliki 3 unsur yakni: adanya perbuatan tertentu, adanya akibat kematian orang lain dan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Adapun unsur kelalaian atau kurang kehati-hatian dalam hal yang disebutkan pasal 359 KUH Pidana adalah bukan ditunjukkan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat yang ditimbulkannya, sehingga termasuk didalamnya suatu pelanggaran dan mengakibatkan hukum pidana.

### **3. Pembunuhan Yang Tidak Mendapat Warisan**

Berdasarkan ketentuan dari pasal 838 KUH Perdata, telah disebutkan bahwa salah satu yang tidak dapat memperoleh warisan meskipun diantara mereka (pewaris dengan ahli waris) memiliki hubungan kekerabatan terdekat dari yang lainnya adalah karena perbuatan pembunuhan oleh ahli waris kepada pewarisnya. Hal ini disebutkan dalam ayat 1, yakni; “mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh si yang telah meninggal”.

Dari bunyi ayat pasal tersebut diatas tidak menyebutkan jenis-jenis pembunuhan yang dimaksud, sehingga memberikan indikasi bahwa semua yang termasuk pembunuhan baik itu pembunuhan tidak disengaja,

terlebih yang merupakan pembunuhan disengaja tidak mendapatkan warisan. Hal ini disebabkan diawatirkannya memberikan peluang terhadap mereka yang memiliki itikad tidak baik terhadap korban untuk mendapatkan harta benda yang dimilikinya sehingga dapat disebutkan dalam surat keputusan pengadilan sebagai salah satu ahli warisnya.

Namun apabila ternyata ahli waris yang berdasarkan keputusan dianggap tidak patut menerima warisan telah menerima atau menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan karena berpura-pura sebagai ahli waris yang memiliki hak, maka dia wajib mengembalikan semua harta benda yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya. Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam KUH Perdata pasal 839. Yakni; “Tiap-tiap waris, yang karena tak patut telah dikecualikan dari pewarisan, berwajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan jatuh meluang.”<sup>96</sup>.

Adapun mengenai bilamana yang dianggap tidak patut menerima warisan memiliki anak ataupun keturunan, maka anak itu berhak atas dirinya sendiri memperoleh warisan dari pewaris, artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantaraan orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris maka anak itu tidak boleh dirugikan akibat dari kesalahan orang tuanya tetapi orang tuanya itulah yang sama sekali tidak mendapat warisan. Ini sesuai dengan pasal 840 KUH Perdata, yakni; “Apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi

---

<sup>96</sup> Prof. R. Subekti, S. H. dan R. Tjitrosudibio, *op cit.*, h. 222

waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari pewarisan; namun orang tua itulah sama sekali tak berhak menuntut supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana, menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya.”<sup>97</sup>.

## **B. Analisis Pembunuhan Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Manusia merupakan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia dengan kekuasaannya sendiri, meniupkan ruh-Nya kepadanya, memerintahkan semua malaikat sujud kepadanya, Dia menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dan membekalinya dengan kekuatan serta ilmu agar ia dapat menguasai bumi ini. Dengan demikian, manusia dapat meraih kesejahteraan kehidupan materiil dan spiritual secara maksimal.

Namun manusia tidak akan meraih sebuah kesuksesan atau tidak dapat merealisasikan semua yang didambakan kecuali pengembangan dirinya terlaksana dan semua hak-haknya terpenuhi.

Hak-hak yang paling utama dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak pemeliharaan kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan pandangan dari sudut manusiawi tanpa mempertimbangkan warna kulit, agama, bangsa, Negara dan posisinya dalam masyarakat.

---

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 223.



Berdasarkan yang tertuang diatas, hak yang paling utama dan wajib mendapat perhatian diantara sekian hak ialah hak hidup. Oleh karenanya, tak dibenarkan seseorang untuk merusak hidup orang lain, baik berupa penganiayaan terlebih dahulu ataupun langsung, terlebih lagi bila melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang bukan hak.

**Allah Berfirman:**

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ  
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

**Terjemahnya;**

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.* (QS. al-Isra’ (17) : 33).<sup>98</sup>

Dari Firman Allah diatas, jelaslah keharamannya untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan kecuali terhadap orang yang kafir dan orang yang murtad itupun melalui jalan hukum syari’ah, dan apabila terjadi pembunuhan yang bukan hak, maka mendapat balasan yang setimpal terhadap perbuatannya tergantung dari jenis pembunuhan yang dilakukan ataukah sikap yang diberi oleh keluarga terbunuh. Jenis-jenis hukuman

---

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, *op cit*, h. 429

yang dapat diperoleh si pembunuhan dapat berupa sangsi diyat, dapat berupa sangsi kaffarah, bahkan dapat pula berupa sangsi qishash.

Adapun yang dimaksudkan dengan pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan mengakibatkannya meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung dan diganjar dengan hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa<sup>99</sup>, serta membaginya dalam tiga bagian, yakni; pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja dan pembunuhan karena suatu kesalahan.

## **2. Macam-macam Pembunuhan**

Secara garis besar, tindakan pembunuhan merupakan suatu reaksi terhadap orang lain sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang mana dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yakni; pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.

Pembunuhan sengaja merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang baik secara langsung maupun melalui tindakan penganiayaan terlebih dahulu yang dilakukan karena telah ada niat sebelumnya ataupun karena kondisi yang memaksa untuk melakukan tindakan pembunuhan. Yang dimaksud dengan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai

---

<sup>99</sup> Prof. Drs. H. A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000) h. 121.

niat untuk membunuh. Dasar pembagian ini adalah pada Firman Allah S.W.T. yang hanya memperkenalkan kedua jenis pembunuhan ini;  
Q. S. al – Nisaa' (4) : 92-93.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ

مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً

مَنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

#### Terjemahnya;

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah

*Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”<sup>100</sup>*

Adapun menurut para ulama fiqh, membagi pembunuhan menjadi beberapa bagian, yakni;

- a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-‘amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya<sup>101</sup>.

pembunuhan seperti ini biasanya menggunakan alat yang diyakini dapat menghilangkan nyawa seseorang, dengan asumsi untuk adanya kepastian bahwa korban yang dituju akan benar-benar mendapatkan ajalnya, adapun alat yang digunakan bisa berupa benda yang tumpul dan keras seperti batu atau kayu balok, bisa juga dengan benda yang tajam seperti pisau, parang, badik dan sebagainya, ataupun menggunakan tali yang dapat digunakan untuk menjerat, atau bisa apa saja yang pada intinya ingin dengan sengaja menghilangkan nyawa korbannya.

- b. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-‘amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian<sup>102</sup>.

Perbuatan yang mengakibatkan kematian ini tidak ditentukan bentuknya, namun pada dasarnya ada suatu tindakan

---

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *op cit*, h. 135-136

<sup>101</sup> Prof. Drs. H. A., *op cit*, h. 123.

<sup>102</sup> *Ibid*, h. 123.

yang dilakukan pelaku terhadap korbannya dengan maksud untuk menganiaya atau mencelakakan tanpa maksud untuk menghilangkan nyawa korban namun pada akhirnya meninggal dunia.

Pembunuhan seperti ini misalnya seseorang memukul orang lain yang mengakibatkan orang tersebut meninggal, atau misalnya memberikan hukuman kepada seseorang karena kesalahan yang telah diperbuat namun mengakibatkan orang yang terhukum itu meninggal dunia.

- c. Pembunuhan tidak sengaja atau dengan kesalahan (*qatl al-khtha'*), perbuatan ini biasanya dilakukan tanpa ada niat membunuh namun dalam melakukannya memang berbahaya terhadap orang lain dan terjadinya kesalahan sehingga mengakibatkan kematian, jenis ini ada tiga kemungkinan, yaitu:
1. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang, seperti seseorang yang menembak binatang buruan tetapi yang dikenai sasaran peluru ternyata manusia.
  2. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tapi ternyata kawan sendiri.

3. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati<sup>103</sup>.

Dari jenis pembunuhan tersebut diatas termasuk juga pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila ataupun orang yang dalam keadaan tidur.

d. Pembunuhan yang dianggap khilaf (*al-jari majrol khathai*), pembunuhan ini biasanya tidak terduga datangnya dan memang pada hakikatnya tidak ada niat untuk mencelakakan seseorang, namun karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang meninggal<sup>104</sup>.

Pembunuhan ini biasanya terjadi karena kurangnya hati-hatian ataupun dikarenakan kelalaian, seperti seseorang yang membawa benda berat diatas gedung namun karena kesalahannya benda itu terjatuh dan menimpa seseorang dibawah sehingga mengakibatkan kematian ataukah seseorang yang membawa binatang buas ditempat umum dan karena kurang kuatnya tali yang mengikat binatang tersebut mengakibatkan terlepas dan menerkam orang disekitarnya hingga meninggal.

Pada hakekatnya pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja atau dengan kesalahan dapat pula disebut sebagai pembunuhan yang langsung (*mubasyarah*),

---

<sup>103</sup> *Ibid.* h. 123.

<sup>104</sup> Drs.A.Assaad Yunus,*Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, *op cit.* h. 34.

sedangkan pembunuhan yang dianggap khilaf dapat disebut sebagai pembunuhan yang tidak langsung (*tasabbub*).<sup>105</sup>

### 3. Pembunuhan yang tidak mendapat warisan

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewarisnya, adalah salah satu sifat yang menyebabkan tersingkirnya untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ketetapan tersebut telah dijelaskan oleh Hadits Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut;

*“Barang siapa membunuh korban, maka ia tidak dapat mewarisinya sekalipun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, maka si pembunuh itu tidak berhak menerima harta warisan”* (HR. Ahmad).<sup>106</sup>

Mengingat karena bermacam-macamnya jenis pembunuhan, para ulama hanya sepakat dengan pembunuhan sengaja dan disertai dengan tindak penganiayaan yang tidak berhak mendapatkan warisan dari sipewaris sedangkan sebagiannya para ulama berbeda pendapat.

Menurut ulama *Syafi'iyah*, berpendapat bahwa pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan. Baik pembunuhan yang disengaja maupun karena silap, baik dilakukan secara langsung (*mubasyarah*) maupun tidak langsung (*tasabbub*), baik dilakukan karena menjalankan hak (kewajiban) maupun bukan, baik pembunuhan yang *akil baligh* maupun orang yang tidak/belum *akil baligh*.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid*, h. 35

<sup>106</sup> Drs.A.Assaad Yunus, *op cit.* h. 32

<sup>107</sup> Prof. Dr. H. Suparman Usman, S. H. dan Drs. Yusuf Somawinata, *op cit*, h. 34.



Menurut ulama *Hanafiyah*, berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadikan seseorang ahli waris termasuk *mawani'ul irts* ialah pembunuhan yang mengakibatkan adanya sangsi *qishash* dan *kaffarah*.

Pembunuhan yang bersangsi *qishash*, yaitu yang dilakukan berdasarkan kesengajaan dengan mempergunakan alat-alat yang dapat dianggap dapat menghancurkan anggota badan orang lain, seperti senjata tajam, alat peledak, benda berat, kayu runcing, dan lain sebagainya<sup>108</sup>.  
Firman Allah S.W.T. :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ....

**Terjemahnnya;**

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ...”(QS. al-Baqarah (2): 178).<sup>109</sup>

Juga dalam Firman Allah S.W.T. :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

**Terjemahnnya;**

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Departemen Agama RI, *op cit*, h. 43



kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.  
(QS. al-Nisaa’ (4) : 93).<sup>110</sup>

Sedangkan pembunuhan yang bersangsi *kaffarah*, yaitu pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau kalau tidak mungkin, ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut, seperti pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena silap, atau pembunuhan yang dianggap silap.<sup>111</sup>

**Firman Allah Swt:**

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً<sup>ج</sup> وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا<sup>ج</sup> فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ<sup>ص</sup> مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ  
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ<sup>ص</sup> مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

**Terjemahnnya;**

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh

<sup>110</sup> *Ibid*, h. 136

<sup>111</sup> Prof. Dr. H. Suparman Usman, S. H. dan Drs. Yusuf Somawinata, *loc. cit.*

*seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisaa' (4) : 92).<sup>112</sup>*

Menurut ulama *Malikiyah*; sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan mirip sengaja dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*) yang disengaja seperti sengaja melepaskan binatang buas hingga menerkam seseorang dan menyebabkannya meninggal<sup>113</sup> atau membuat lubang untuk menjebak seseorang.

Ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan tanpa hak yang dibebani sanksi qishash, diyat dan kafarat, seperti pembunuhan dengan sengaja, mirip disengaja, karena silap, dianggap silap, tidak langsung, maupun yang dilakukan oleh orang tidak cakap, seperti anak kecil dan orang yang dalam keadaan tidak sadar (seperti orang gila dan orang yang dalam keadaan tidur).<sup>114</sup>

Menurut ulama *Hambaliyah*, berpendapat bahwa jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan

---

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *op cit*, h. 135

<sup>113</sup> Drs.A.Assaad Yunus, *op cit*. h. 36.

<sup>114</sup> Prof. Dr. H. Suparman Usman, S. H. dan Drs. Yusuf Somawinata, *op cit*. h. 36.

sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena khilaf, pembunuhan dianggap khilaf, pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*) dan pembunuhan yang dilakukan oleh yang tidak cakap bertindak.<sup>115</sup>



---

<sup>115</sup> Drs.A.Assaad Yunus, *loc. cit.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan seseorang untuk terhalangi mendapatkan warisan. Adapun pengertian dan macam-macam pembunuhan serta jenis-jenis pembunuhan yang tidak mendapatkan warisan menurut ketentuan hukum kewarisan Perdata dan hukum kewarisan Islam.

##### **1. Analisis pembunuhan dalam kewarisan menurut hukum Perdata**

###### **a). pengertian pembunuhan**

Pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang pembunuhan, yaitu yang tercantum dalam pasal 338 (pembunuhan biasa), pasal 339 (pembunuhan dengan pemberatan/yang dikualifisir), pasal 340 (pembunuhan berencana), pasal 341 (pembunuhan bayi/anak biasa), pasal 342 (pembunuhan bayi berencana), pasal 343 (untuk mengancam orang lain/selain ibu yang terlibat pembunuhan bayi), dan sebagainya.

b). Macam-macam pembunuhan.

Mengenai permasalahan pembunuhan dalam Hukum Kewarisan, maka secara otomatis menyangkut masalah Hukum Pidana. Dimana pada hakikatnya pembunuhan berkenaan langsung serta menyangkut tentang Hukum Pidana dan lebih dikenal dengan kejahatan terhadap nyawa. Didalam KUH Pidana mengenai pembunuhan, pembunuhan terbagi atas dua bagian. Yakni:

(1)Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) yang dilakukan dengan sengaja. Yang dimaksud adalah pembunuhan yang mengandung unsur kesengajaan dalam bertindak, kesengajaan dalam sasaran dan kesengajaan dalam hal alat yang digunakan.

Adapun macam-macamnya ialah:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok,
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindakan pidana lain,
- c. Pembunuhan berencana,
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan,
- e. Pembunuhan atas permintaan korban dan
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri,

(2)Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) yang dilakukan dengan tidak sengaja. Yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan terhadap orang lain dan mengakibatkan meninggal dunia.

Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja diatur dalam KUH Pidana pasal 359 yang berbunyi: *“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana paling lama 1 tahun”*

c). Pembunuhan yang tidak mendapat warisan.

Berdasarkan ketentuan dari pasal 838 KUH Perdata, disebutkan bahwa salah satu yang tidak dapat memperoleh warisan adalah karena perbuatan pembunuhan oleh ahli waris kepada pewarisnya.

Dari ayat 1 pasal 838 tidak menyebutkan jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan, sehingga memberikan indikasi bahwa semua yang termasuk pembunuhan baik itu pembunuhan tidak disengaja, terlebih yang merupakan pembunuhan disengaja, tidak mendapatkan warisan. Hal ini disebabkan diawatirkannya memberikan peluang terhadap mereka yang memiliki itikad tidak baik terhadap korban untuk mendapatkan harta benda yang dimilikinya sehingga dapat disebutkan dalam surat keputusan pengadilan sebagai salah satu ahli warisnya.

## 2. Analisis pembunuhan dalam kewarisan menurut hukum Islam

### a) pengertian pembunuhan

pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan mengakibatkannya meninggal dunia baik secara langsung maupun

tidak langsung dan diganjar dengan hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Berdasarkan hal diatas, maka sesungguhnya tidak dibenarkan seseorang untuk merusak hidup orang lain, baik berupa penganiayaan terlebih dahulu ataupun langsung, terlebih lagi bila melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang bukan hak.

Allah Berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ....

#### **Terjemahnya;**

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.*

#### **b). macam-macam pembunuhan**

Secara garis besar, tindakan pembunuhan merupakan suatu reaksi terhadap orang lain sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang mana dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yakni; pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.

Adapun menurut para ulama fiqh, membagi pembunuhan menjadi beberapa bagian, yakni;

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.
  2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.
  3. Pembunuhan tidak sengaja atau dengan kesalahan (*qatl al-khtha'*), perbuatan ini biasanya dilakukan tanpa ada niat membunuh namun dalam melakukannya memang berbahaya terhadap orang lain dan terjadinya kesalahan sehingga mengakibatkan kematian.
  4. Pembunuhan yang dianggap khilaf (*al-jari majrol khathai*), pembunuhan ini biasanya tidak terduga datangnya dan memang pada hakikatnya tidak ada niat untuk mencelakakan seseorang, namun karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang meninggal.
- c). pembunuhan yang tidak mendapat warisan

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewarisnya, adalah salah satu sifat yang menyebabkan tersingkirnya untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ketetapan tersebut telah dijelaskan oleh Hadits Rasulullah SAW, sebagaimana artinya disebutkan;

*“Barang siapa membunuh korban, maka ia tidak dapat mewarisinya sekalipun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris*



*selain dirinya, dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, maka si pembunuh itu tidak berhak menerima harta warisan” (HR. Ahmad)*

Mengingat karena bermacam-macamnya jenis pembunuhan, para ulama hanya sepakat dengan pembunuhan sengaja dan disertai dengan tindak penganiayaan yang tidak berhak mendapatkan warisan dari sipewaris sedangkan sebagiannya para ulama berbeda pendapat.

Menurut ulama *Syafi'iyah*, berpendapat bahwa pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan. Baik pembunuhan yang disengaja maupun karena silap, baik dilakukan secara langsung (*mubasyarah*) maupun tidak langsung (*tasabbub*), baik dilakukan karena menjalankan hak (kewajiban) maupun bukan, baik pembunuhan yang *akil baligh* maupun orang yang tidak/belum *akil baligh*

Menurut ulama *Hanafiyah*, berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadikan seseorang ahli waris termasuk *mawani'ul irts* ialah pembunuhan yang mengakibatkan adanya sangsi *qishash* dan *kaffarah*.

Menurut ulama *Malikiyah*; sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan mirip sengaja dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*) yang disengaja seperti sengaja melepaskan

binatang buas hingga menerkam seseorang dan menyebabkannya meninggal atau membuat lubang untuk menjebak seseorang.

Ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan tanpa hak yang dibebani sanksi qishash, diyat dan kafarat, seperti pembunuhan dengan sengaja, mirip disengaja, karena silap, dianggap silap, tidak langsung, maupun yang dilakukan oleh orang tidak cakap, seperti anak kecil dan orang yang dalam keadaan tidak sadar (seperti orang gila dan orang yang dalam keadaan tidur)

Menurut ulama *Hambaliyah*, berpendapat bahwa jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena khilaf, pembunuhan dianggap khilaf, pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*) dan pembunuhan yang dilakukan oleh yang tidak cakap bertindak.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA* (Cet. 2; Jakarta; AKADEMIKA PERSSINDO) 1995.

Amanat, Anisitus. CN. *MEMBAGI WARISAN, berdasarkan pasal-pasal hukum perdata BW* (cet. 3; jakarta; PT RajaGrafindo Persada) 2003.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (yogyakarta; UII Press Yogyakarta, anggota IKAPI) 2005.

Arifin, Bustanul. *PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA, Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya* (Jakarta; Gema Insan Press) 1996.

As-Shabuni, Muhammad Ali. *hukum waris dalam syari'at islam* (Cet. III; Bandung; CV. Diponegoro) 1995.

Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Hukum Waris* (Cet. 1; solo; CV. Pustaka Mantiq) 1994.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya CV. Jaya Sakti) 2002.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah* (Cet. 3; Jakarta; PT RajaGrafindo Persada) 2000.

FOKUSMEDIA, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung; Fokusmedia) 2005.

Hamzah, Andi. KUHP dan KUHP (Cet. 15; Rineka Cipta) 2007

Mourik, M. JA. Van. Studi Kasus Hukum Waris (Bandung: PT. Eresco) 1993.

Ash-Shabuni, Syekh Muhammad Ali. Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadist (bandung; trigenda karya) 1995.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia (Cet. 3; Bandar Lampung, PT. Citra Aditya Bakti) 2000.

Parangin, Effendi. Hukum Waris (Cet. 3; PT. RajaGrafindo Persada) 2001.

Ramulyo, M. Idris. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta; Sinar Grafika) 2004.

Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada) 2002.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia (Cet. 6; Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada) 2003.

Saleh, E. Hassa. Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer (Jakarta; Rajawali Pers) 2008

Salim, Oemar. Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia (Jakarta; Bumi Aksara) 1987.

Salim, S. Pengantar Hukum Perdata Tertulis, BW (Jakarta Sinar Grafika) 2002.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cet. 37; jakarta; PT. Pradnya Paramita) 2006.

Suhardana, F.X. Buku Panduan Mahasiswa (Cet. 2; Jakarta PT. Gramedia Pusaka Utama) 1996.

Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW (Cet. 2; Bandung; PT. Refika Aditama) 2007.

Umam, Dian Khairul. Fiqih Mawaris (Bandung; CV. PUSTAKA SETIA) 1999.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. Fiqh Mawaris (Cet. 2; Jakarta; GAYA MEDIA PRATAM) 2002.

YUNUS, A. Assaad. Pokok-Pokok Hukum Kewarisan (Jakarta; PT. Alqushwa) 1992.

Yunus, A. Assaad. Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh) (Jakarta; PT. Alqushwa) 2006.